

**ANALISIS PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**



Disusun Oleh:

Muhammad Nur

21919031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

TESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Magister Strata-2 Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Diajukan Oleh:

Nama: Muhammad Nur

No. Mahasiswa: 21919031

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

MUHAMMAD NUR

No. Mhs. : 21919031

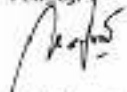
Konsentrasi : Akuntansi Pemerintahan

Dengan Judul:

**ANALISIS PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMURN**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Penguji II



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan thesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Penulis



(Muhammad Nur)

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mahmadi', written in a cursive style.

Dr. Mahmadi, S.E., M.Si.

HALAMAN MOTTO

"Kunci keberhasilan yang sebenarnya adalah konsistensi."

(B.J. Habibie)

"Waktumu terbatas, jangan habiskan untuk hidup orang lain."

(Steve Jobs)

"Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan."

(Steve Jobs)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang sudah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan thesis dengan judul “Analisis Pengaruh *Good Governance* dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur”. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat. Peneliti sangat bersyukur atas selesainya penyusunan thesis ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Berbagai kesulitan sudah dilewati dalam rangka penyusunan thesis ini, tapi berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak, terkhusus kedua orang tuaku tercinta, ayah, Drs. H. Muhammad Saleh dan ibu, Hj. Darna atas limpahan kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tak pernah putus-putusnya, serta saudara-saudara ku dan seluruh keluarga yang sudah menyemangati, memberi keceriaan, dan memotivasi untuk terus berusaha memberi yang terbaik selama pembuatan thesis ini.

Dalam penyusunan thesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dengan kerendahan Hati Saya Muhammad Nur Yakni Peneliti menyampaikan banyak terimakasih pada:

1. Allah SWT, atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan thesis ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan pada Allah SWT.
3. Kedua orang tua penulis, Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tidak ada putusya memberi doa, semangat, serta motivasi. Terima kasih sudah berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan, dan mendampingi peneliti sehingga mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Yakni selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA. Yakni selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. Yakni selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak. Yakni selaku dosen pembimbing thesis yang sangat berjasa dalam memberi ilmu, proses, serta kesabaran selama penulis mengerjakan thesis, sehingga thesis ini dapat diselesaikan.
8. Seluruh dosen Program Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang sudah diberikan sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti dan menjadi bekal dalam pembuatan studi ini.

9. Teman-teman MAKSI Angkatan 23 kelas A. Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan selama menyelesaikan thesis ini, dan menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah dan saling memberi semangat bagi satu sama lain.
10. Pada keluarga di BTP Blok M.230 Om Ancu, Tante Eka, Mbak Titin, Mbak Dwi, serta sepupu saya Kak Cemmang dan Wawan yang sudah memberi dukungan, arahan, motivasi, dan pengalaman baru selama tinggal bersama-sama di rumah hijau.
11. Dinda Rahayu Suci Ramadhan yang sudah memberi dukungan moral, doa-doa baik, menjadi tempat untuk berbagi cerita dan menemani penulis dalam mengerjakan thesis ini hingga selesai.
12. Terimakasih juga saya sampaikan pada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas sumbangsi baik berupa doa, materi, tenaga, dan fikiran sehingga proses pembuatan thesis ini berjalan dengan lancar.

Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan mereka, serta ilmu, amal dan iman yang kita miliki dapat diterima di sisi-Nya. Akhirnya peneliti berharap thesis ini akan memberi manfaat bagi siapapun yang membacanya. Meski demikian, thesis ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya, kritik dan saran bagi pembaca menjadi harapan peneliti. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa mengiringi tiap langkah kita dan meridhoi jalan hidup kita, *Amiiin yaa rabbal 'aalamiin*.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Yogyakarta, Januari 2024

ABSTRAK

Studi ini tujuannya guna menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Metode pengambilan sampel di studi ini memakai jenis *non-probability* sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel di studi ini sebanyak 98 sampel yang terdiri dari Ketua Pimpinan di tiap OPD dan Kepala Bagian Keuangan di tiap OPD, dengan pertimbangan kepala bagian keuangan relatif mengetahui kondisi stafnya dan mengawasi langsung pekerjaan bagian pelaporan. Pengujian data di studi ini memakai metode *Statistical Program for Social Science* (SPSS) version 28. Hasil studi ini memperlihatkan akuntabilitas, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Lalu transparansi tidak berdampak secara signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Daya Tanggap, *Rule of law*, Efisiensi dan Efektivitas, Kepemimpinan, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

The study aims to empirically test the influence of accountability, transparency, responsiveness, rule of law, efficiency and effectiveness and leadership on the performance of the East Kutai Regency Regional Government. The method of sampling in this research used non-probability sampling with a purposive sampling technique. The sample in this study was 98 samples consisting of the Head of Leadership in each OPD and the chief finance officer of each opd, considering that the finance director is relatively aware of his staff's condition and directly monitor the reporting work. Data testing in this research used the Statistical Program for Social Science (SPSS) version 28 method. The results of this study show that accountability, responsiveness, rule of law, efficiency and effectiveness and leadership have a positive and significant impact on the East Kutai Regency Regional Government performance. Meanwhile, transparency does not have a significant effect on the performance of the East Kutai Regency Regional Government.

Keywords: *Accountability, Transparency, Responsiveness, Rule of law, Efficiency and Effectiveness, Leadership, The Performance of Local Governments*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPEL DEPAN	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2.1.2. Kinerja Pemerintah Daerah	15
2.1.3. Akuntabilitas.....	19
2.1.4. Transparansi	21
2.1.5. Daya Tanggap.....	24
2.1.6. <i>Rule of law</i>	26
2.1.7. Efisiensi dan Efektivitas	27
2.1.8. Kepemimpinan	29
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	30
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	36
2.3.1 Pengaruh akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah.....	38
2.3.2 Pengaruh transparansi pada kinerja pemerintah daerah.....	38
2.3.3 Pengaruh daya tanggap pada kinerja pemerintah daerah	38

2.3.4	Pengaruh <i>rule of law</i> pada kinerja pemerintah daerah.....	39
2.3.5	Pengaruh efesiensi dan efektifitas pada kinerja pemerintah daerah.....	39
2.3.6	Pengaruh Kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerah.....	40
2.4	Kerangka Konseptual	40
BAB 3.	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Lokasi, Waktu Penelitian dan Ruang Lingkup.....	42
3.3	Populasi dan Sampel.....	43
3.4	Metode Pengumpulan Data	46
3.5	Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel.....	47
3.6	Metode Analisis Data	53
3.6.1	Uji Kualitas Data	54
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	55
3.6.3	Uji Statistik Deskriptif.....	56
3.7	Model Pengujian Hipotesis.....	56
3.7.1.	Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	57
3.7.2.	Uji Simultan (Uji Statistik F)	58
3.7.3.	Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)	58
BAB 4.	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian.....	60
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian	60
4.1.2	Deskripsi Data Penelitian	64
4.1.3	Deskripsi Karakteristik Responden	68
4.1.4	Analisis Statistik Deskriptif	72
4.1.5	Uji Kualitas Instrumen dan Data	74
4.1.6	Analisis Asumsi Klasik	77
4.1.7	Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)	79
4.2	Pembahasan	84
4.2.1	Pengaruh akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah.....	84
4.2.2	Pengaruh transparansi pada kinerja pemerintah daerah.....	86
4.2.3	Pengaruh daya tanggap pada kinerja pemerintah daerah	87
4.2.4	Pengaruh <i>rule of law</i> pada kinerja pemerintah daerah.....	88

4.2.5	Pengaruh efesiensi dan efektifitas pada kinerja pemerintah daerah.....	89
4.2.6	Pengaruh Kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerah.....	91
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Keterbatasan Penelitian	94
5.3	Saran	95
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		103

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
2.1	Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	31
3.1	Daftar OPD di Kabupaten Kutai Timur	44
3.2	Indikator Variabel Akuntabilitas.....	48
3.3	Indikator Variabel Transparansi	49
3.4	Indikator Variabel Daya Tanggap.....	50
3.5	Indikator Variabel <i>Rule of law</i>	50
3.6	Indikator Variabel Efisiensi dan Efektifitas	51
3.7	Indikator Variabel Kepemimpinan.....	52
3.8	Indikator Variabel Kinerja Pemerintah Daerah.....	53
4.1	Populasi OPD di Kabupaten Kutai Timur	65
4.2	Pengembalian Kuesioner	67
4.3	Profil Usia Responden	69
4.4	Deskripsi Responden sesuai Jenis Kelamin.....	70
4.5	Deskripsi Responden sesuai Pendidikan Terakhir	70
4.6	Deskripsi Responden sesuai Masa Bekerja	71
4.7	Uji Deskriptif	72
4.8	Hasil Uji Validitas dari Item-Item Variabel Penelitian	75
4.9	Hasil Uji Reliabilitas Item-Item Variabel Penelitian	77
4.10	Uji Normalitas	78
4.11	Uji Heteroskedastisitas	78
4.12	Uji Multikolineartias	79
4.13	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	80
4.14	Hasil Uji Simultan (F) & Adjusted R2	83

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
2.1	Kerangka Model Penelitian.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah diartikan menjadi hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau sudah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP No. 18 Tahun 2016). Berdasar pada Nordiawan & Hertianti (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tapi juga dari sisi *outcome*, manfaat dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat.

Disamping penilaian pada kinerja, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang sudah dicapainya. Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja.

Kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam tiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD pada DPR atau DPRD diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003. Oleh sebab itu laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat monitoring yang dipakai oleh masyarakat dalam menilai kinerja Pemerintah (Ari setyaningrum, 2015).

Berdasar pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah yang sudah direvisi dengan UU No. 09 Tahun 2015 terkait Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Hidayah & Suprojo, 2018). Prinsip utama dalam UU itu merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan dan mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pemberdayaan, peran dan layanan publik untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Isu *Good Governance* menjadi perhatian utama dalam administrasi publik saat ini. Masyarakat menuntut pemerintah, terutama pelaksana pemerintahan hingga pengambil kebijakan, untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Maka, respon yang baik dari pemerintah diperlukan untuk merespon tuntutan wajar masyarakat ini, melalui perubahan dan perbaikan yang terarah, guna mencapai terwujudnya pemerintahan yang baik (Azmal, 2018).

Good Governance ialah tahapan penyelenggaraan kekuasaan Negara guna melaksanakan penyediaan publik *goods services and service*. Agar *Good Governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas profesional moral yang tinggi. Maka konsep *Good Governance* ini berdampak dan peranan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja pegawai pemerintahan. Maka respon pada *Good Governance* ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah pun cukup *concern* mengenai ini (Nasrun, 2019).

Terkait implementasi pelayanan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi No. 5 Tahun 2004 pada 9 Desember 2004 terkait Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Diktum Ketiga dan Keempat Instruksi itu, disarankan agar Kepala Unit Kerja membuat penetapan kinerja secara berjenjang bersama pejabat di bawahnya (Dumbi & Dunggio, 2022). Ini tujuannya guna wujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya lewat penetapan target kerja serta indikator kinerja yang gambarkan keberhasilan pencapaiannya baik seperti hasil atau manfaat.

Berdasar pada Auditya (2013) *Good Governance* ialah pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola berbagai urusan publik di suatu negara. Indikator dari *Good Governance* melibatkan akuntabilitas, transparansi, responsivitas, kemampuan guna mendorong penegakan hukum, dan pelaksanaan pengelolaan pemerintahan dengan efisiensi dan efektivitas. Berdasar pada Werimon et al. (2007) penerapan akuntabilitas dan transparansi mengakibatkan adanya pengawasan yang intensif dari masyarakat, memastikan pengelolaan pemerintahan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Maka, ini akhirnya bisa menciptakan kinerja pemerintahan yang optimal.

Menerapkan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan mendukung kepentingan rakyat. Kinerja pemerintah daerah sangat terkait dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Berdasar pada Mardiasmo (2009), evaluasi kinerja memiliki kepentingan khusus dalam menilai tanggung jawab organisasi dan manajer

dalam menyediakan pelayanan publik yang unggul. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan performa pemerintah daerah.

Berdasar pada Jitmau et al. (2017) prinsip transparansi mencakup dua komponen penting dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka terhadap informasi mengenai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Dua aspek tersebut akan sulit dilaksanakan tanpa manajemen kinerja yang efektif. Manajemen kinerja yang baik menjadi titik awal bagi terwujudnya transparansi. Transparansi perlu dijaga keseimbangannya dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga atau informasi yang berpotensi memengaruhi hak privasi individu. Implementasi transparansi dalam pengelolaan pemerintahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, tapi dari pengamatan langsung kelapangan mengindikasikan belum optimal standarisasi dari proses-proses pelayanan publik yang holistik dan sistem pemberian informasi pada publik (Wahyu et al., 2022).

Perubahan pesat dalam teknologi informasi serta kondisi sosial saat ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat, mengharuskannya menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan itu. Dalam mengantisipasi ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menjadi lebih responsif dan tanggap, mengambil inisiatif untuk menanggapi permasalahan yang sudah muncul atau sedang berlangsung, serta meramalkan potensi masalah yang mungkin timbul (Azmal, 2018).

Pemerintah daerah perlu menyelaraskan aspirasi masyarakat dan mengimplementasikannya melalui peraturan, kebijakan, program, dan kegiatan. Lembaga-lembaga publik harus memiliki responsivitas yang cepat dan efisien dalam melayani pemangku kepentingan. Responsivitas mencerminkan kemampuan pemerintah guna mengenali kebutuhan masyarakat, menetapkan agenda prioritas, dan mengubahnya menjadi program-program yang sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Maka, tingkat responsivitas mencerminkan kesesuaian antara program dan kegiatan pemerintah daerah dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, tingkat responsivitas juga dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan atau keluhan masyarakat (Rosyada, 2016).

Lembaga-lembaga pemerintah perlu tanggap, responsif pada kepentingan pemangku-nya. Berdasar pada Soeprpto (2006) implementasi daya tanggap dalam pengelolaan pemerintahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah berkewajiban menjamin *rule of law* optimal pada semua aspek serta menjamin praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan UU yang berlaku dalam tiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme. *Rule of law* pada dasarnya mengartikan hukum berperan sebagai dasar bertindak bagi semua komponen masyarakat dalam suatu negara. Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, diwajibkan sesuai pada hukum atau peraturan, serta menjamin hak asasi manusia (warga negara), menerapkan pembagian kekuasaan, dan tunduk pada pengawasan lembaga peradilan. Fokus utama

dalam penerapan hukum mencakup tiga elemen, yaitu keadilan, hasil yang bermanfaat, dan kepastian hukum (Nurhazizal et al., 2019).

Berdasar pada Azmal, (2018) inti konsep *rule of law* ialah jaminan apa yang disebut keadilan sosial. Pemerintah memastikan tiap rancangan dan ketetapan seluruh produk hukum sesuai kaidah *regulatory practice principle* analisis kebijakan yang holistik dan sistemik. Implementasi *rule of law* dalam pengelolaan pemerintahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, tapi dari pengamatan langsung lapangan mengindikasikan belum optimal penerapan kebijakan dan pelayanan publik sesuai hukum.

Konsep efisiensi dan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Makin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, maka makin efektif organisasi, program atau kegiatan dalam kata lain efisiensi berfokus pada hasil (output) dan proses maka efektivitas berfokus pada dampak (*outcome*) (Sari et al., 2020). Penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya publik yang optimal dilakukan secara berdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif) merupakan tujuan prioritas utama dari tiap pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006, efisiensi ialah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli selanjutnya dipakai untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu.

Berdasar pada Mardiasmo (2009) efektivitas ialah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan

perbandingan outcome dengan output. Suatu organisasi di anggap efektif, bila bisa mencapai tepat tujuan dengan ekonomis dan efisien. Implementasi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah, tapi dari pengamatan langsung kelapangan mengindikasikan belum optimal penggalan potensi sumberdaya daerah untuk memaksimalkan anggaran yang berorientasi.

Pengaruh dari pemimpin dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di dalam organisasi dapat dicapai melalui upaya pengembangan kinerja karyawan. Sebagai seorang pemimpin dalam memimpin pemerintah daerah, penting untuk selalu memperhatikan anggota tim, memberi motivasi kerja yang positif, dan menyediakan fasilitas serta alat teknologi yang berkualitas (Rahmatullah, 2018).

Peran penting pemimpin dan motivasi kerja dalam pemerintah daerah dan instansi memiliki dampak yang signifikan. Pada tingkat pemerintah daerah, keberadaan seorang pemimpin sangat krusial, karena tanpa adanya pemimpin, arah dan tujuan pemerintah daerah dapat terhambat karena kurangnya pengawasan terhadap bawahan. Lalu, motivasi kerja juga penting karena tanpa adanya pemimpin yang memberi arahan dan dorongan, semangat kerja bawahan dapat menurun, menghambat produktivitas.

Pengimplementasian akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan pengelolaan pemerintahan dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah seberapa besar kepercayaan dan dukungan berbagai pihak, tekad yang serius pada pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan pemerintah daerah (Ardianty et al., 2022).

Selanjutnya peneliti juga mereview topik, hasil kesimpulan dan pandangan pada penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya diantaranya Rahayu (2016) dengan hasil penelitian yang juga memperlihatkan akuntabilitas publik, partisipasi dan kerangka hukum berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik tapi transparansi kebijakan publik tidak berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Nasrun, 2019) juga memperlihatkan *Good Governance* berdampak signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Putra et al. (2022) juga memperlihatkan transparansi berdampak pada kinerja pemerintah instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Lalu, akuntabilitas dan pengendalian intern tidak berdampak pada kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Studi ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan judul Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* pada Kinerja SKPD Pemerintah Kab. Gresik. Kemudian Nasrun (2019) dengan judul Pengaruh *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta Putra et al. (2022) dengan judul Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern pada kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. Perbedaan studi ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi penelitian yang berbeda karena studi ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur. Kemudian studi ini juga menambah 4 (empat) variabel independen diantaranya yakni daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, serta kepemimpinan.

Berdasar pada peneliti diperlukan pengkajian secara mendalam untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat, apakah pemerintah daerah sudah berhasil atau belum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai penjelasan di atas, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kutai Timur dan inkonsistensi dari hasil peneliti sebelumnya. Sesuai hal itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh *Good Governance* dan kepemimpinan Pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?
2. Apakah transparansi berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?
3. Apakah daya tanggap berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?
4. Apakah *rule of law* berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?
5. Apakah efisiensi dan efektivitas berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?

6. Apakah kepemimpinan berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari studi ini ialah untuk mendapatkan bukti empiris sebagaimana sudah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh daya tanggap pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh *rule of law* pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi dan efektivitas pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis studi ini ialah untuk memberi sumbangan pemikiran dan memperluas ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Good Governance* terlebih mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan kinerja pemerintah daerah dan bisa menjadi tambahan literatur atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil studi ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

3. Bagi akademisi,

Hasil studi ini diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan memberi referensi mengenai kinerja pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberi arahan terkait penulisan yang jelas, maka peneliti menguraikan sistematika pembahasan menjadi:

BAB I Pendahuluan. Memuat terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Memuat beberapa landasan teoritis yang relevan mengenai hal- hal yang berhubungan dengan lingkup pembahasan untuk mendukung proses penelitian.

- BAB III** Metode Penelitian. Memuat definisi operasional, lokasi penelitian, populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.
- BAB IV** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Memuat hasil penelitian sesuai data-data yang diperoleh lengkap dengan pembahasannya.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran. Memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan serta saran-saran. Diakhiri dengan daftar pustaka beserta lampiran- lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab ini mencakup tinjauan teori yang melibatkan definisi, konsep, dan hasil penelitian terkait kinerja pemerintah daerah. Lalu, penentuan *grand theory* menjadi dasar penelitian, dan juga pembahasan teori yang dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, serta kepemimpinan.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory (Teori Keagenan) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen yang mana agen tidak selalu harus bertindak sesuai keinginan principal. Berdasar pada Aini (2019) mendefinisikan hubungan keagenan ialah sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih sebagai prinsipal meminta pihak lain yakni sebagai agen untuk mengerjakan pekerjaan atas nama prinsipal dengan pendelegasian wewenang membuat keputusan pada agen. Principal dan agen memiliki informasi, tujuan serta kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan. Sebagai agen, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang optimal sesuai kesepakatan. Masyarakat, sebagai pihak yang memberi dana, akan menerima hasil dan dampak dari alokasi itu. Manajemen diberi kewenangan untuk mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.

Maka, manajemen berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya pada masyarakat.

Teori keagenan berupaya menjabarkan hubungan antara agen dan prinsipal memakai mekanisme suatu kontrak. Teori keagenan memakai penekanan pada penyelesaian 2 masalah yakni:

- a. Masalah keagenan yang ada saat keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal berkaitan, dan sulit untuk prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya.
- b. Masalah pembagian resiko (*risk sharing*) yang dialami saat prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda pada suatu resiko.

Berdasar pada Zimmerman (1977) berkata permasalahan agensi muncul di segala jenis organisasi, seperti di sektor swasta antara pemegang saham dan manajemen, serta di sektor publik antara pemerintah daerah dan rakyat. Teori agensi berfokus pada penentuan kontrak yang paling efektif untuk mengatur hubungan antara pihak yang memberi mandat (prinsipal) dan pihak yang melaksanakan (agen) (Eisenhardt, 1989)

Keterkaitan antara teori agensi dan studi ini memperlihatkan pemerintah daerah memegang wewenang penuh dan memiliki pemahaman menyeluruh mengenai semua aspek pemerintahan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas seluruh wewenang itu pada masyarakat. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

2.1.2 Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian "*performance*". Berdasar pada Robbins & Judge (2006) kinerja merujuk pada evaluasi hasil kerja yang diukur dengan menggunakan kriteria yang sudah disetujui bersama. Dalam konteks perumusan skema strategis atau perencanaan strategis, kinerja menggambarkan sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan berhasil dicapai dalam mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi dalam periode waktu tertentu (Mahsun, 2011). Berdasar pada PP No. 58 Tahun 2005 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 35 kinerja merujuk pada output atau hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dan program, yang diukur sehubungan dengan penggunaan anggaran, dengan aspek kuantitas dan kualitas yang dapat diukur.

Pengukuran kinerja ialah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan, sasaran, dan strategi. Ini tujuannya guna memantau kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, akuntabilitas, kepuasan konsumen, serta memberi kontribusi ekonomi (Wattimena, 2020).

Berdasar pada Mardiasmo (2009) Pengukuran kinerja menjadi sangat penting dalam mengevaluasi akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Sesuai Permenpan No. 25 Tahun 2012 terkait Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran ini melibatkan penilaian sistematis sesuai kelompok indikator kinerja kegiatan, yang mencakup indikator-indikator masukan (*input*), hasil (*output*), dan dampak (*outcome*).

Berdasar pada Mahsun (2011) Pemanfaatan indikator kinerja menjadi krusial dalam menilai apakah suatu aktivitas atau program sudah dijalankan dengan efisiensi dan efektivitas. Penetapan indikator kinerja perlu memperhatikan beberapa komponen, seperti biaya pelayanan (*cost of service*), penggunaan (*utilization*), kualitas dan standar pelayanan (*quality and standards*), cakupan pelayanan (*coverage*), dan tingkat kepuasan (*satisfaction*).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan ialah prasyarat untuk pengukuran kinerja (Nurbaeti & Nugraha, 2019). Pedoman yang dipakai ialah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (*performance plan*). Target itu lalu dibandingkan dengan pencapaian aktual pada akhir tahun, sehingga dapat diidentifikasi perbedaan antara target kinerja dan realisasi, di mana realisasi ada di bawah target (*performance gap*). Perbedaan ini akan dianalisis guna merumuskan strategi peningkatan kinerja di masa berikutnya.

Berdasar pada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007) Kinerja instansi pemerintah merujuk pada evaluasi tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi itu.

Ini mencerminkan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pemantauan kinerja pemerintah daerah sangat esensial untuk mengukur pencapaian program atau kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai kehendak sendiri, yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan peraturan yang berlaku (Halim et al., 2013).

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dapat dinilai melalui sejumlah parameter kinerja yang berhasil dicapainya. Sesudah sistem pengelolaan keuangan terbentuk, perlu diterapkan alat pengukur kinerja yang dapat mengendalikan jalannya pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghindari ketidakjelasan arah dalam kebijakan pembangunan. Berdasar pada Mascarenhas (1996), pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam penyediaan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk menunjukkan bagaimana uang publik sudah digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tapi juga mencerminkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah.

Pendekatan konsep kinerja organisasi publik daerah sering dikaitkan dengan penggunaan anggaran dan dikenal dengan istilah kinerja dalam terminologi perhitungan efisiensi keuangan. Berdasar pada Mardiasmo (2009), pemahaman

konsep kinerja organisasi publik dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu memandangnya dari perspektif birokrasi organisasi itu sendiri dan melihatnya dari sudut pandang kelompok sasaran atau pengguna layanan organisasi publik. Kedua perspektif ini saling berinteraksi karena pemahaman mengenai kinerja organisasi publik erat kaitannya dengan lingkungan di mana organisasi itu beroperasi dan berkembang.

Konsep kinerja organisasi publik, terutama pada tingkat daerah, terkait erat dengan aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, serta kepemimpinan. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban guna menilai sejauh mana kinerjanya berhasil atau tidak. Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup perbandingan antara anggaran dan realisasi, perbandingan antara standar biaya dan realisasi, target dan persentase fisik, serta standar pelayanan yang diharapkan. Indikator pengukuran kinerja yang efektif harus relevan, jelas, hemat biaya, sederhana, dan berfungsi sebagai sinyal untuk mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan manajerial dan penyelidikan lebih lanjut (Sumarsono, 2010).

Kinerja dapat dinilai melalui pencapaian keberhasilan di tiap unit organisasi perangkat daerah, yang saling terkait dan mendukung untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah secara keseluruhan sesuai ukuran kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja diartikan sebagai

indikator, baik keuangan maupun non-keuangan, dari pekerjaan atau hasil aktivitas suatu unit organisasi (Faiz & Andayani, 2022).

Sesuai pandangan peneliti, kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai gambaran tingkat pencapaian sasaran sesuai pedoman yang dilakukan oleh seluruh aparat sesuai program atau kegiatan, sejalan dengan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini bertujuan agar sarana dan prasarana yang tersedia dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan

2.1.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) memiliki asal-usul dari bahasa Latin, yaitu dari kata "*computare*" yang terdiri dari dua suku kata, yakni "cum" yang berarti dengan atau bersama, dan "*putare*" yang berarti mengandaikan, menghitung, memperhitungkan, atau mempertimbangkan (Haryatmoko, 2011). Berdasar pada Caiden (1988), akuntabilitas diartikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban, melakukan perhitungan, serta memberi laporan atau pertanggungjawaban atas tindakan dan informasi yang diminta, terutama oleh pihak eksternal organisasi, terutama masyarakat yang menerima pelayanan.

Berdasar pada Haryatmoko (2011) terdapat 3 tujuan yang ingin dicapai melalui prinsip akuntabilitas, yaitu keadilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan peningkatan kinerja. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan individu, badan hukum,

serta kepemimpinan kolektif dalam sebuah organisasi pada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban. Dalam ranah akuntabilitas publik, terdapat akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Meskipun konsep akuntabilitas pada pemerintah daerah sudah umum diterapkan, terutama dalam fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, melibatkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aspek lainnya.

Berdasar pada Sopanah (2005) pemerintah yang *accountable* memiliki ciri-ciri yakni:

1. Menyediakan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan dengan cara yang transparan, cepat, dan akurat pada masyarakat.
2. Memberi layanan pada masyarakat yang memuaskan.
3. Membuka peluang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
4. Menjelaskan dan bertanggung jawab secara proporsional terkait tiap kebijakan publik.
5. Memberi sarana pada masyarakat untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sudah berhasil.

Berdasar pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2003) Akuntabilitas ialah tanggung jawab untuk memberi pertanggungjawaban

atau menjawab serta menjelaskan kinerja dan tindakan individu, badan hukum, atau kepemimpinan kolektif dalam sebuah organisasi pada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui suatu proses pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Ismiarti, 2013). Pada pokoknya, akuntabilitas ialah proses memberi informasi dan mengungkapkan detail kegiatan serta kinerja keuangan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Mardiasmo, 2009).

Dari penjelasan di atas, berdasar pada pandangan peneliti, akuntabilitas ialah konsep kewajiban yang terkait dengan menyabilan informasi dan mengungkapkan tiap aktivitas pada pihak lain melalui mekanisme pertanggungjawaban secara konsisten dan proposional. Tujuannya ialah untuk mencapai tata kelola yang baik dan mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan non-keuangan.

2.1.4 Transparansi

Transparansi ialah suatu prinsip yang menjamin kebebasan akses bagi tiap individu untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi seputar kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaannya, dan hasil-hasil yang sudah dicapai. Dalam konteks ini, transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan

informasi terkait dengan pengelolaan sumber daya publik pada pihak-pihak yang memerlukan informasi itu (Mardiasmo, 2009).

Berdasar pada Annisaningrum (2010) transparansi berarti memberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur pada masyarakat, mengingat masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan padanya, serta kepatuhannya pada peraturan dan undang-undang. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dapat diidentifikasi melalui beberapa kriteria, termasuk adanya pertanggungjawaban yang terbuka, ketersediaan akses pada laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, hak untuk mengetahui hasil audit, dan ketersediaan informasi mengenai kinerja.

Berdasar pada Auditya (2013) Transparansi ialah prinsip yang menjamin kebebasan tiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Adanya kontrol yang kuat dari masyarakat diharapkan dapat mendorong pengelola pemerintahan untuk beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat. Prinsip transparansi mencakup dua aspek utama, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Dalam rangka membangun transparansi dalam organisasi sektor publik, diperlukan empat komponen kunci, termasuk sistem pelaporan keuangan, sistem pengukuran

kinerja, praktik audit sektor publik, dan saluran akuntabilitas publik yang efektif (Werimon et al., 2007).

Berdasar pada Coryanata (2007) Transparansi dibangun atas dasar aliran informasi yang bebas di seluruh proses pemerintahan dan lembaga-lembaga, di mana informasi itu dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan informasinya harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi dalam penyusunan anggaran oleh pihak eksekutif dianggap terpenuhi bila memenuhi beberapa kriteria, seperti adanya pengumuman kebijakan anggaran, ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tepat waktu, pengakomodasian suara atau usulan dari rakyat, dan adanya sistem pemberian informasi pada publik.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memberi informasi sejelas mungkin pada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan. Sebagai respons, pengelola pemerintahan berupaya memberi kinerja terbaik dengan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan (Rahmanurrasjid, 2008).

Berdasar pada Krina & Lalolo (2003). Prinsip transparansi minimal dapat diukur melalui sejumlah indikator, seperti mekanisme yang menjamin keterbukaan sistem dan standarisasi semua proses pelayanan publik, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik terkait kebijakan dan pelayanan publik, serta mekanisme yang memfasilitasi pelaporan atau penyebaran informasi atau

penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ialah asas yang memberi akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara sesuai peraturan UU.

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas vertikal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga terbentuk pemerintahan daerah yang bersih, sesuai *rule of law*, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Maka, sesuai pandangan peneliti, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi terkait kebijakan, regulasi, prosedur, tata kerja, dan batasan kerahasiaan suatu strategi dari satu pihak ke pihak yang berhak membutuhkan informasi dengan jujur, benar, dan tidak diskriminatif.

2.1.5 Daya tanggap

Daya tanggap ialah kapasitas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, merumuskan prioritas agenda, dan menerjemahkannya ke dalam program-program yang sesuai aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Maka, daya tanggap mencerminkan keterpaduan antara program dan kegiatan pemerintah

dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. Penilaian daya tanggap juga dapat dilakukan dengan mengukur sejauh mana pemerintah daerah merespon kebutuhan atau keluhan masyarakat (Rosyada, 2016). Lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap dan responsif pada kepentingan masyarakat sebagai pemangku (Suprpto, 2006).

Perubahan dan kemajuan dalam teknologi informasi, serta dinamika situasi yang cepat, menimbulkan berbagai tantangan bagi masyarakat. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah daerah harus menunjukkan responsivitas yang tinggi dengan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memprediksi masalah yang mungkin muncul. Pemerintah daerah juga perlu merespons dan mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pembentukan peraturan, kebijakan, program, dan kegiatan. Pusat pelayanan pengaduan, kotak saran, surat pembaca, dan sarana lainnya juga harus disediakan sebagai wujud tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Adapun langkah-langkah inisiatif pemerintah daerah dalam berdaya tanggap meliputi:

1. Menyediakan layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Merespons dengan cepat terhadap laporan pengaduan yang diterima.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap itikad baik pemerintah daerah.
4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk terus memberi koreksi dan saran terkait pemerintahan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan daerah.

Maka, konsep daya tanggap mencakup kemampuan pemerintah daerah untuk secara efektif merespons perubahan kebijakan, saran, dan koreksi dari masyarakat sesuai kewenangannya, guna meminimalkan dampak masalah yang muncul.

2.1.6 *Rule of law*

Rule of law, atau aturan hukum, pada dasarnya mengarah pada konsep di mana hukum dianggap sebagai dasar bertindak bagi seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara. Berdasar pada Haryatmoko (2011) inti dari konsep *rule of law* ialah menjamin apa yang disebut sebagai keadilan sosial. Berdasar pada Sumantri (1992) Pemerintah diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai pada hukum atau undang-undang, dengan memberi jaminan pada hak asasi manusia (warga negara), memastikan pembagian kekuasaan, dan melibatkan pengawasan dari badan-badan peradilan. Ada 3 unsur utama yang harus mendapatkan perhatian seimbang dalam implementasi penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil yang bermanfaat, dan kepastian hukum.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan optimalitas *rule of law* dalam semua aspek dan menjamin kelangsungannya melalui langkah-langkah:

1. Melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.

2. Menetapkan peraturan hukum dan undang-undang yang jelas, tegas, serta mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali.
3. Menyediakan lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
4. Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik sesuai hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.
5. Mengimplementasikan rancangan dan ketetapan semua produk hukum sesuai prinsip-prinsip praktik regulasi.
6. Merancang undang-undang sesuai analisis kebijakan yang holistik dan sistemik.

Sesuai penjelasan di atas, *rule of law* diartikan sebagai aturan hukum yang ditegakkan bersama secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2.1.7 Efisiensi dan Efektivitas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mendefinisikan efisiensi sebagai hubungan antara masukan dan keluaran. Efisiensi diukur sebagai indikator apakah penggunaan barang dan jasa oleh organisasi perangkat pemerintahan dalam mencapai tujuannya dapat menghasilkan manfaat tertentu. Efisiensi, dalam konteks ini, mencerminkan pencapaian output maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang minimal untuk mencapai output tertentu (Mardiasmo, 2009).

Berdasar pada Adisasmita (2011) berkata efisiensi merujuk pada proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Maka, efisiensi dapat dinilai melalui perbandingan rasio antara output dan input. Berdasar pada Sukirno (2010), ini melibatkan tindakan yang dapat mengurangi kerugian atau pemborosan sumber daya saat melakukan atau menghasilkan sesuatu, dengan berusaha mencapai hasil yang diinginkan dengan pengorbanan yang paling tepat. Indikator efisiensi mencerminkan hubungan antara masukan sumber daya yang digunakan oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah, biaya administratif) dan hasil yang dihasilkan (Sumenge, 2013).

Berdasar pada Mardiasmo (2009) efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program sesuai target yang sudah ditetapkan, dan secara sederhana dapat diukur dengan membandingkan outcome dengan output. Berdasar pada Kosasih dalam Sukirno (2010) efektivitas juga dapat dilihat sebagai perbandingan antara masukan dan keluaran dalam berbagai kegiatan hingga mencapai tujuan yang ditetapkan, termasuk aspek kuantitas, kualitas, atau batas waktu yang ditargetkan. Suatu organisasi dianggap efektif bila dapat mencapai tujuan dengan cara yang ekonomis dan efisien.

Konsep efisiensi dan efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dan tujuan. Makin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, makin efektif organisasi, program, atau kegiatan itu. Sementara tujuan efisiensi lebih

berfokus pada hasil (*output*) dan proses, efektivitas menitik beratkan pada dampak (*outcome*).

Maka, efisiensi dan efektivitas menjadi ukuran hasil dari pemanfaatan potensi internal organisasi untuk mencapai dampak tertinggi dari tujuan yang sudah ditetapkan.

2.1.8 Kepemimpinan

Organisasi sangat memerlukan kontribusi seorang pemimpin karena pemimpin memiliki dampak yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Maka, seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi atau pengetahuan yang lebih baik, terutama dalam bidang manajemen dan strategi. Pemimpin juga diharapkan memiliki perilaku yang positif, kemampuan mempengaruhi dan memberi arahan pada orang lain, kemampuan pengambilan keputusan, serta tanggung jawab yang baik, termasuk dalam menyampaikan ide dengan bijak, memberi dukungan, dan memberi motivasi. Selain itu, penting bagi seorang pemimpin untuk dapat menjalin hubungan personal yang baik (*human relation*) dengan bawahan-bawahannya.

Berdasar pada Robbins & Judge (2006) kepemimpinan ialah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai visi dan tujuan tertentu. Dalam konteks supervisi, kepemimpinan merupakan salah satu elemen dalam tindakan pengawasan dan pengendalian mutu. Supervisi merupakan salah satu unsur pengendalian mutu. Berdasar pada Terry & W. Rue (2010) kepemimpinan melibatkan hubungan individu atau pemimpin dengan orang lain,

yang memotivasi mereka untuk bekerja dengan penuh kesadaran dalam kerangka tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka, kepemimpinan dapat dianggap sebagai seni atau proses yang melibatkan motivasi, pengaruh, koordinasi, dorongan, petunjuk, dan bimbingan pada individu atau kelompok, dengan tujuan mencapai target dan sasaran tanpa menggunakan paksaan.

Lebih spesifik untuk kepemimpinan di tengah dunia yang berubah, ialah perilaku kepemimpinan yang berorientasi pengembangan, yakni kepemimpinan yang menghargai eksperimentasi, mengusahakan munculnya gagasan-gagasan baru, dan menimbulkan serta melaksanakan perubahan. Pemimpin demikian akan mendorong ditemukannya cara-cara baru untuk menyelesaikan urusan, melahirkan pendekatan baru pada masalah, dan mendorong anggota untuk memulai kegiatan baru.

Begitulah, di tengah gencarnya perubahan lingkungan, tanpa upaya perubahan organisasional yang tepat di bawah kepemimpinan yang kuat, visioner, cerdas, dan berorientasi pengembangan, suatu organisasi akan berjalan terseok, bahkan mungkin akan mati didera kuatnya arus perubahan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi ini mengacu dari beberapa review hasil penelitian terdahulu yang bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian		Hasil Penelitian dan Peneliti
			Dependen	Independen	
1.	M. Horison, Taresa & Sayogo, Djoko Sigit (2014)	Praktik Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Terbuka	Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi • Sumber Daya Manusia • Keterbukaan Dokumen Anggaran • Partisipasi • Komitmen 	Demokrasi, PDB per kapita, sumber daya manusia, pengungkapan dokumen anggaran, partisipasi dan komitmen OGP berhubungan positif dan secara signifikan mempengaruhi ukuran transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas fiskal negara.
2.	Pratiwi, Diana (2014)	Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> pada Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi	Kinerja pemerintah daerah	Penerapan prinsip <i>good corporate governance</i>	Ada korelasi positif dari penerapan prinsip GCG pada kinerja Pemerintah Kota Bekasi.
3.	Wiguna, Yuniarta & Darmawan (2015)	Pengaruh Pengawasan Daerah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kinerja Pemerintah Daerah Buleleng	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan keuangan • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah • Transparansi pengelolaan keuangan daerah 	Secara parsial dan simultan pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja pemerintah daerah.
4.	Krisherdiyan, Rido Agung Gigih (2015)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah • Transparansi pengelolaan keuangan daerah 	Transparansi laporan keuangan daerah berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah Akuntabilitas keuangan daerah berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah.
5.	Ayu Amrina Rosyada, (2016)	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> dalam	Pengukuran pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Aturan hukum • Transparansi 	Partisipasi, aturan hukum transparansi, akuntabilitas publik serta efisiensi dan efektifitas

		rangka pelayanan publik		<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas publik • Efisiensi dan efektifitas 	berdampak positif signifikan dalam pelayanan publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
6.	Dwi Inggawati Rahayu (2016)	Pengaruh Pelaksanaan <i>Good Governance</i> pada Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Gresik.	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas publik • Partisipasi • Kerangka hukum • Transparansi 	Akuntabilitas publik, partisipasi dan kerangka hukum berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik tapi transparansi kebijakan public tidak berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik.
7.	Riswanto, Natak (2016)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah • Transparansi pengelolaan keuangan daerah 	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember.
8.	Erian Azmal (2018)	Analisis Pengaruh Faktor-Faktor <i>Good Governance</i> Pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Transparansi • <i>Responseveness</i> 	Hasil studi ini memperlihatkan secara simultan akuntabilitas, transparansi dan <i>responsiveness</i> berdampak secara simultan berdampak signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. Secara parsial akuntabilitas, transparansi dan <i>responsiveness</i> berdampak positif signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat.
9.	Rahmatullah (2018)	Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Pada Kinerja Karyawan Pada Pt. Btpn Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa	Kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan • Motivasi kerja 	Kepemimpinan berdampak positif dan motivasi kerja berdampak negative akan tapi secara simultan semua variabel mempunyai pengaruh positif yang signifikan pada kinerja karyawan pada PT. BTPN cabang sungguminasa. Lalu hasil analisis secara parsial

					kepemimpinan berdampak signifikan dan motivasi berdampak negatif dan tidak signifikan pada kinerja karyawan pada PT. BTPN cabang sungguminasa.
10.	Indriana & Muhammad Nasrun (2019)	Pengaruh <i>Good Governance</i> Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kinerja keuangan pemerintah daerah	<i>Good Governance</i>	Hasil studi ini mampu memberi secara simultan <i>Good Governance</i> berdampak signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan.
11.	Mohamad Faiq (2021)	Pengaruh <i>Strategy Leadership</i> Dan <i>Environmental Management</i> Pada <i>Competitive Advantage</i> Dan <i>Firm Performance</i> Pada Industri Perhotelan Di Kota Yogyakarta	<i>Firm Performance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strategy Leadership</i> • <i>Environmental Management</i> • <i>Strategy Leadership</i> • <i>Environmental Management</i> • <i>Competitive Advantage</i> 	Hasil analisis di studi ini memperlihatkan <i>strategy leadership</i> berdampak positif pada <i>competitive advantage</i> . <i>Environmental management</i> berdampak positif pada <i>competitive advantage</i> . <i>Strategy leadership</i> berdampak positif pada <i>Firm performance</i> , <i>environmental management</i> berdampak positif pada <i>Firm performance</i> dan <i>competitive advantage</i> berdampak positif pada <i>Firm performance</i> .
12.	Dhana Driyantama Putra, Cornelius Rantelangi, & Ferry Diyanti (2022)	Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pengendalian intern pada kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda	Kinerja instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas • Pengendalian intern 	Hasil penelitian memperlihatkan transparansi berdampak pada kinerja pemerintah instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Lalu, akuntabilitas dan pengendalian intern tidak berdampak pada kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

Sumber: Data diolah sendiri, 2023

Implementasi akuntabilitas dan transparansi menciptakan kontrol yang kuat dari masyarakat, mendorong pengelola pemerintahan untuk beroperasi sesuai norma yang ada. Sebagai hasilnya, kinerja pemerintahan dapat berkembang dengan baik (Werimon et al., 2007). Penerapan berbagai aturan dan undang-undang yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan tata kelola yang efektif dan pro-rakyat. Berdasar pada Nasrun (2019) *Good Governance* ialah penerapan kekuasaan politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola urusan publik suatu negara. *Good Governance* memiliki indikator, seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, kemampuan untuk mempromosikan penegakan hukum, serta mengelola pemerintahan secara efisien dan efektif, yang pada akhirnya menghasilkan kinerja pemerintah yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi, efektivitas, dan kepemimpinan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Maka, pengembangan hubungan antar variabel tersebut bisa dijabarkan, yakni:

1. Pengaruh Akuntabilitas pada Kinerja Pemerintah Daerah:

Akuntabilitas, yang diartikan sebagai kewajiban untuk menyabilan informasi penyelenggaraan dan pengungkapan atas aktivitas, memiliki dampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik (Rahayu, 2016).

2. Pengaruh transparansi pada kinerja pemerintah daerah.

Pada studi Riswanto (2016), menemukan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah di

Kabupaten Jember. Oleh karena itu, makin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan di tiap SKPD, makin meningkat kinerja pemerintah daerah.

3. Pengaruh Daya Tanggap pada Kinerja Pemerintah Daerah

Studi dari Pratiwi (2014) menyimpulkan penerapan prinsip *good corporate governance* (daya tanggap) berdampak positif pada kinerja Pemerintah Kota Bekasi. *Responsiveness* pada pelayanan di tiap SKPD akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

4. Pengaruh *Rule of law* pada Kinerja Pemerintah Daerah.

Sesuai studi Rahayu (2016) memperlihatkan *rule of law* berdampak pada kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan menerapkan *rule of law* di tiap SKPD, kinerja pemerintah daerah dapat meningkat.

5. Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas pada Kinerja Pemerintah Daerah

Studi dari Rosyada (2016) mengatakan efisiensi dan efektivitas berdampak positif dan signifikan dalam kinerja SKPD di Kota Samarinda. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas di tiap SKPD dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

6. Pengaruh Kepemimpinan pada Kinerja Pemerintah Daerah.

Sesuai hasil studi dari Khaerul (2015) mengatakan kepemimpinan berdampak positif dan signifikan pada kinerja pegawai di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Maka, kepemimpinan dapat memengaruhi kinerja pegawai dan pada akhirnya kinerja pemerintah daerah.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi atau prediksi yang akan diuji kebenarannya melalui analisis data relevan dalam penelitian. Dalam konteks perumusan masalah dan kerangka konseptual, hipotesis pada studi ini dikembangkan sesuai telaahan teoritis dan tinjauan literatur sebelumnya. Rumusan hipotesis dapat dijabarkan sebagai berikut: Akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, serta kepemimpinan memiliki dampak positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi menciptakan kontrol yang kuat dari masyarakat, mendorong pengelola pemerintahan untuk beroperasi sesuai norma yang ada (Werimon et al., 2007). Penerapan berbagai aturan dan undang-undang yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan pro-rakyat.

Berdasar pada Auditya (2013) *Good Governance* dapat diartikan sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam mengelola berbagai urusan publik di suatu negara. Konsep *Good Governance* mencakup beberapa indikator, seperti akuntabilitas, transparansi, responsivitas, kemampuan untuk mempromosikan penegakan hukum, serta pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif. Ini pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan kinerja pemerintah yang baik.

Kinerja instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana sasaran atau tujuan instansi tersebut tercapai, sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang sudah

ditetapkan. Kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan, guna mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2003; Permenpan No. 25 Tahun 2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Selanjutnya, hubungan yang mendasari teori agensi dalam studi ini menunjukkan pemerintah daerah berperan sebagai penerima kewenangan (agen) dan memiliki pemahaman menyeluruh terhadap seluruh aspek pemerintahan. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kewenangan tersebut pada masyarakat (prinsipal), yang berharap mendapatkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang adil, merata, dan berkesinambungan.

Kerangka berpikir dalam studi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas, serta kepemimpinan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan merinci latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian dan mengembangkan hipotesis sesuai teori yang sudah dikaji dan hasil tinjauan literatur. Untuk menguji kebenaran hipotesis, peneliti melakukan analisis survei dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur persepsi responden. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik simpulan dalam studi ini. Pengembangan hipotesa pengaruh antar tiap variabel diuraikan yakni:

2.3.1 Pengaruh akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil studi dari Rahayu (2016) akuntabilitas publik berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik. Ini memperlihatkan ada korelasi dari akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah yakni makin tinggi akuntabel pengelolaan keuangan daerah di tiap SKPD maka makin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris itu di atas, maka hipotesa pertama di studi ini ialah:

H1: akuntabilitas berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

2.3.2 Pengaruh transparansi pada kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil studi dari Riswanto (2016) transparansi pengelolaan keuangan daerah berdampak signifikan pada kinerja pemerintah daerah di Kab. Jember. Ini memperlihatkan adanya korelasi transparansi pada kinerja pemerintah daerah yakni makin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan di tiap SKPD maka makin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris itu di atas, maka hipotesa yang dibangun ialah:

H2: Transparansi berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh daya tanggap pada kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil studi dari Pratiwi (2014) penerapan prinsip *good corporate governance (responsiveness)* berdampak positif pada kinerja Pemerintah Kota Bekasi. Ini memperlihatkan ada korelasi daya tanggap pada kinerja pemerintah daerah yakni makin tanggap pelayanan di tiap SKPD maka makin meningkatkan

kinerja pemerintah daerah. Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris itu di atas, maka hipotesa yang dibangun ialah:

H3: Daya tanggap berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

2.3.4 Pengaruh *rule of law* pada kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil studi dari Rahayu (2016) *rule of law* berdampak pada kinerja Pemerintah Kab. Gresik. Ini memperlihatkan ada korelasi dari *rule of law* pada kinerja pemerintah daerah yakni makin diterapkan *rule of law* di tiap SKPD maka makin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris itu di atas, maka hipotesa yang dibangun ialah:

H4: Rule of law berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

2.3.5 Pengaruh efisiensi dan efektifitas pada kinerja pemerintah daerah

Sesuai hasil studi dari Pratiwi (2014) penerapan prinsip *good corporate governance (efficiency and effectiveness)* berdampak positif pada kinerja Pemerintah Kota Bekasi. (Rosyada, 2016) efisiensi dan efektifitas berdampak positif signifikan dalam kinerja SKPD di Kota Samarinda. Ini memperlihatkan ada korelasi dari efisiensi dan efektifitas pada kinerja pemerintah daerah yakni makin efisien dan efektif program atau kegiatan di tiap SKPD maka makin meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris itu di atas, maka hipotesa yang dibangun ialah:

H5: efisiensi dan efektifitas berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

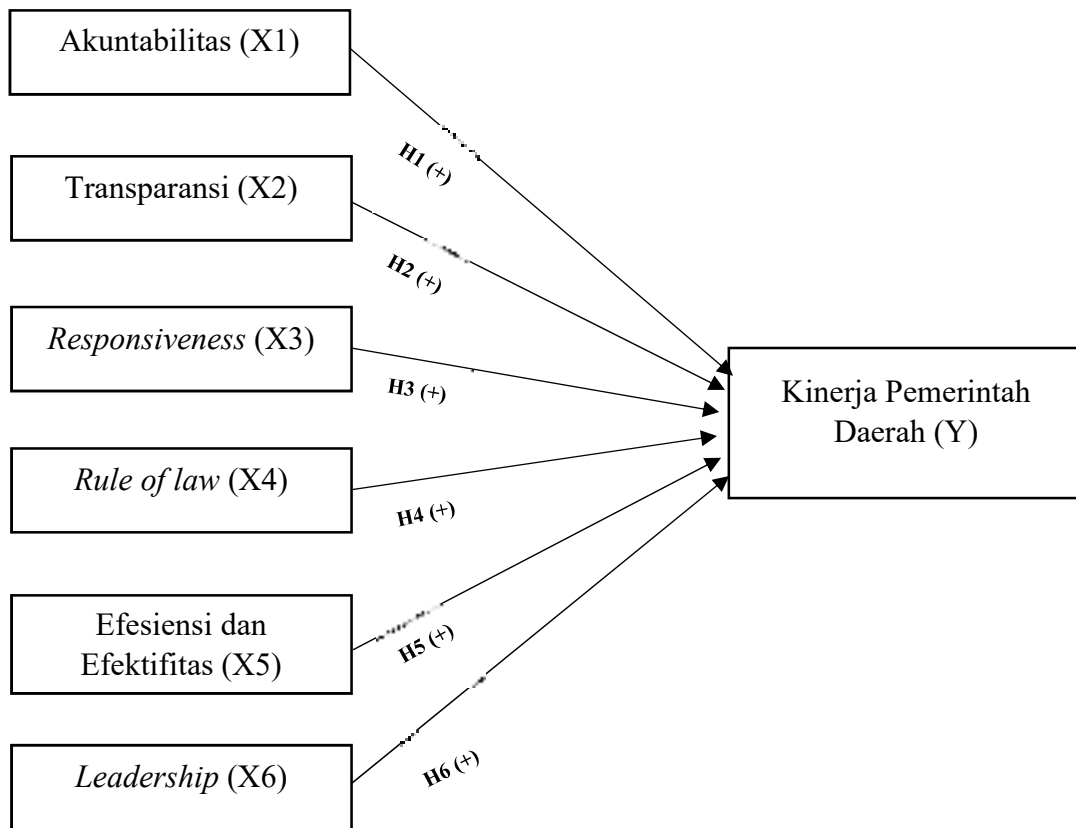
2.3.6 Pengaruh Kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerah

Kepemimpinan ialah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan pengaruh kepemimpinan pada pemerintah daerah diatas, maka rumusan hipotesis di studi ini ialah:

H6: Kepemimpinan berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep ialah model konseptual terkait seperti apa teori berhubungan dengan faktor yang sudah terlihat menjadi masalah yang penting (Sekaran, 2006). Sesuai kajian teoritis dan hasil penelitian empiris sebelumnya, peneliti membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektifitas serta kepemimpinan yang diduga berdampak secara simultan dan parsial pada kinerja pemerintah daerah. Kerangka konsep digambarkan:



Gambar 2.1 Kerangka Model Penelitian

Gambar Kerangka Konseptual

Sesuai Gambar diatas, dapat dijelaskan tanda panah memperlihatkan tiap variabel independen memengaruhi secara parsial atau simultan pada variabel dependen seperti studi dari (Werimon et al., 2007) dan (Audyta, 2013). Kinerja pemerintah daerah berkaitan erat dengan karekteristik *Good Governance*. Kerangka konsep yang baik bisa menjabarkan secara teoritis antara pertautan antar variabel yang akan diteliti (Daulay, 2010). Kerangka Konsep dipakai guna perlihatkan pengaruh tiap variabel pada suatu penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Desain studi ini memakai metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey yang mencoba menggali seperti apa fenomena itu terjadi serta lakukan analisis dinamika kausalitas untuk menjelaskan pengaruh variabel independent pada variabel dependen. Data penelitian yang dipakai bersifat primer dan berbentuk persepsi dari responden (subjek). Pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung, dan instrumen yang digunakan ialah kuesioner atau angket. Tujuan dari penggunaan kuesioner ini ialah untuk memperoleh data mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, serta hubungan antar variabel pada masa lalu atau saat ini. Selain itu, kuesioner digunakan untuk menguji beberapa hipotesis terkait variabel sosiologis dan psikologis dalam populasi penelitian. Penyusunan kuesioner ini mengacu pada replikasi penelitian sebelumnya dan kemudian dimodifikasi oleh peneliti sesuai teori yang relevan.

3.2 Lokasi, Waktu Penelitian dan Ruang Lingkup

Studi ini dilakukan di Pemerintah Kab. Kutai Timur alasan dipilihnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menjadi lokasi penelitian sebab dari pengamatan awal, peneliti masih temukan beberapa indikator dari akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektifitas serta kepemimpinan yang belum dilaksanakan secara optimal dan peneliti menduga berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Lalu,

domisili dari peneliti dekat dengan lokasi penelitian maka diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang sudah direncanakan yakni selama 3 (tiga) bulan. Waktu penelitian dimulau dari bulan Agustus 2023 s/d November 2023.

Ruang lingkup studi ini dibatasi pada 6 (enam) variabel independen (X) yakni akuntabilitas (X1), transparansi (X2), daya tanggap (X3), *rule of law* (X4), efesiensi dan efektifitas (X5) serta kepemimpinan (X6) yang diduga berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

3.3 Populasi dan Sampel

Berdasar pada Handayani (2020) populasi ialah totalitas dari tiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti. Lalu sampel ialah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu, atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil berdasar pada prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sandu & Sodik, 2015).

Populasi sasaran di studi ini ialah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kab. Kutai Timur yang berjumlah 51. Sampel dan responden di studi ini ialah 1 (satu) orang Pimpinan di tiap OPD dan 1 Kepala Bagian Keuangan di tiap OPD, dengan pertimbangan kepala bagian keuangan relatif mengetahui kondisi stafnya dan mengawasi langsung pekerjaan bagian pelaporan. Metode pengambilan sampel di studi ini memakai jenis *non-probability* sampling dengan teknik *purposive* sampling. Berdasar pada Sugiyono (2018) teknik *purposive* sampling ialah pengambilan sampel

dengan memakai beberapa pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Adapun nama-nama OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar OPD di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama OPD (Dinas, Badan, Bagian dan Lembaga)
1	Dinas Pariwisata
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
3	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	Dinas Pendidikan
6	Dinas Kebudayaan
7	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Sosial
10	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Pekerjaan Umum
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Dinas Perkebunan
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
23	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
24	Dinas Pangan
25	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
27	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Dinas Pertanian
29	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
30	Badan Penelitian dan Pengembangan
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
33	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
34	Inspektorat Wilayah
35	Sekretariat DPRD
36	Bagian Umum dan Kepegawaian
37	Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
38	Bagian Humas dan Protokol
39	Bagian Perekonomian
40	Bagian Sosial
41	Bagian Pemerintahan
42	Bagian Hukum
43	Bagian Keuangan

44	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
45	Bagian Pembangunan
46	Bagian Sumber Daya Alam
47	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
48	Lembaga Departemen Agama
49	Lembaga Kejaksaan Tinggi
50	Lembaga Pengadilan Negeri Sangatta
51	DPRD Kutai Timur

Sumber : Perda Kabupaten Kutai Timur

3.4 Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai di studi ini ialah data kualitatif yakni data kuesioner yang jadi medata primer. Berdasar pada Umar (2000) Data primer ialah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu dari individu atau perseorangan melalui wawancara atau pengisian kuesioner, yang umumnya dilakukan oleh peneliti. Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data yang diterapkan secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi untuk mencari data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner. Proses pengumpulan data dengan kuesioner dilaksanakan melalui formulir Google yang dikirimkan oleh peneliti kepada 102 responden, dan penelitian ini menunggu tanggapan selama 30 hari.

3.5 Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel merujuk pada penentuan konstruk yang membentuk variabel tersebut, sehingga dapat diukur secara konkret. Berdasar pada Indriantoro & Supomo (2002) definisi operasional merupakan penentuan konstruk sehingga variabel tersebut dapat diukur. Dalam konteks ini, definisi operasional menjelaskan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengoperasionalkan konstruk, memungkinkan peneliti lain untuk mengulang pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik (Sutarsa, 2023).

Berdasar pada Lubis (2016) variabel independen ialah variabel yang bisa memengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan memiliki hubungan positif dan negatif dengan variabel lainnya. Sementara itu, variabel dependen ialah variabel yang menjadi fokus utama dalam pengamatan, yakni variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.

Pengukuran di studi ini memakai skala interval dengan teknik skala sikap model *Likert's Summated Rating* (LSR). Berdasar pada Erlina (2008) skala Likert disusun untuk menilai sejauh mana subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. Pendapat responden diukur menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima preferensi jawaban, disabilan dalam bentuk centang (√) dengan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju), skor 2 (TS = Tidak Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 4 (S = Setuju), dan skor 5 (SS = Sangat Setuju).

1. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas ialah kewajiban penyajian informasi pertanggungjawaban ke pihak yang lain secara konsisten dan proposional pada pengelolaan keuangan dan non-keuangan. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 6 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan ialah adaptasi dari instrumen kuesioner (Ismiarti, 2013). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.2
Indikator Variabel Akuntabilitas

Variabel	Indikator	Refrensi
Akuntabilitas	Dasar penyajian informasi rencana strategis dan kebijakan umum anggaran penyelenggaraan pemerintah	(Ismiarti, 2013)
	Orientasi utama pengelolaan pelayanan public	
	Keterlibatan internal dan eksternal pada tahapan pengelolaan anggaran	
	proposionalitas penjelasan dan pertanggungjawaban kebijakan publik	
	ketersediaan sarana publik untuk evaluasi nilai derajat capaian pengelolaan kebijakan umum anggaran	

2. Transparansi (X2)

Transparansi ialah keterbukaan informasi pada pihak yang berhak dengan jujur, benar dan tidak diskriminatif. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala

sikap model Likert, memakai alat kuesioner 5 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan ialah adaptasi dari instrumen kuesioner (Ismiarti, 2013). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.3
Indikator Variabel Transparansi

Variabel	Indikator	Refrensi
Transparansi	Ketersediaan pengumuman kebijakan anggaran	(Ismiarti, 2013)
	Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses	
	Ketersediaan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu	
	Terakomodasinya suara/usulan publik	
	Ketersediaan sistem pemberian informasi pada publik	

3. Daya tanggap (X3)

Daya tanggap ialah kemampuan reaksi pemerintah daerah menanggapi perubahan kebijakan, saran dan koreksi masyarakat sesuai batas kewenangan untuk meminimalisir dampak masalah. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 4 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan merupakan adaptasi dari instrumen kuesioner (Rosyada, 2016). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.4
Indikator Variabel Daya Tanggap

Variabel	Indikator	Refrensi
Daya Tanggap	Ketersedian prosedur layanan pengaduan	(Rosyada, 2016)
	Tindak lanjut laporan pengaduan	
	Tingkat kepercayaan atas itikad kebijakan	
	Sikap konsistensi memberi koreksi dan saran	
	Tingkat kuantitas partisipan dalam pengawasan	

4. *Rule of law* (X4)

Rule of law ialah aturan hukum yang dipedomani bersama berlangsung terus menerus dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 6 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan merupakan adaptasi dari instrumen kuesioner (Ningsih, 2013). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.5
Indikator Variabel *Rule of law*

Variabel	Indikator	Refrensi
<i>Rule of law</i>	Keutuhan aspek penegakan hukum	(Ningsih, 2013)
	Ketersediaan lembaga kredibel	
	Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik sesuai hukum	
	Implementasi regulatory practice principle rancangan dan produk hukum	

	Implementasi analisis kebijakan yang holistic dan sistemik rancangan dan produk hukum	
	Sikap penghargaan pada HAM dan nilai kemasyarakatan.	

5. Efisiensi dan Efektifitas (X5)

Efisiensi dan efektifitas ialah hubungan hasil dari proses pemanfaatan potensi yang dilakukan internal organisasi pada pencapaian dampak tertinggi dari tujuan yang sudah ditetapkan organisasi. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 5 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan merupakan adaptasi dari instrumen kuesioner (Ningsih, 2013). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.6
Indikator Variabel Efisiensi dan Efektifitas

Variabel	Indikator	Referensi
Efisiensi dan efektifitas	Pemanfaatan teknologi pada pekerjaan	(Ningsih, 2013)
	Tindakan perbaikan yang berkelanjutan	
	Implementasi pemantapan struktur organisasi	
	Ketersediaan kajian sumber daya manusia, sumber daya fisik dan dana keuangan	
	Tindakan optimalisasi penggunaan sumber daya pada tujuan	
	Kejelasan sikap dukungan pada tujuan yang berhasil dan berdaya guna yang berkelanjutan	

6. Kepemimpinan (X6)

Kepemimpinan ialah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa memakai kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 5 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan merupakan adaptasi dari instrumen kuesioner (Rahmatullah, 2018). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.7
Indikator Variabel Kepemimpinan

Variabel	Indikator	Referensi
Kepemimpinan	Mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi	(Rahmatullah, 2018)
	Sudah memberi tindakan memakai pendekatan yang menganut unsur paksaan dan hukuman	
	Lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan	
	Sudah membimbing pegawai dalam menyelesaikan tugas	
	Sudah memberi pelatihan peningkatan kualitas mutu pada karyawan	

7. Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja pemerintah daerah ialah tingkat pencapaian sasaran sesuai pedoman dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah daerah berkaitan dengan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengukuran variabel memakai pembobotan skala sikap model *Likert*, memakai alat kuesioner 5 butir pernyataan. Kuesioner yang diajukan merupakan adaptasi dari instrumen kuesioner dari (Ismiarti, 2013). Jawaban responden diberi pembobotan angka-angka (rating) 5 point dengan rincian skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 (Tidak Setuju), skor 3 (Netral), skor 4 (Setuju) dan skor 5 (Sangat Setuju).

Tabel 3.8
Indikator Variabel Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel	Indikator	Refrensi
Kinerja pemerintah daerah	Standar kualitas yang sudah ditetapkan dengan baik	(Ismiarti, 2013)
	Implementasi prinsip ekonomis, efesien dan efektif	
	Pada capaian tujuan	
	Strategi berpedoman pada celah kinerja (performance gap)	
	Orientasi alokasi dana pada kepentingan pelayanan publik	
	Penerapan standar pelayanan publik yang holistik	

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai di studi ini yakni model regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) yang tujuannya guna menguji dan menganalisis, baik secara simultan atau secara parsial seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi,

daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektifitas serta kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerah. Uji statistik yang akan dipakai di studi ini terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif dan uji hipotesis. Adapun pengolahan data memakai alat bantu aplikasi *software* program SPSS.

3.6.1. Uji Kualitas Data

Pengujian ini dilaksanakan guna mencari tahu kualitas berupa konsistensi dan akurasi data yang dihimpun lewat instrumen penelitian yang tersusun atas (Ghozali, 2016):

a. Uji Validitas

Uji validitas dipakai guna menentukan sejauh mana suatu kuesioner dianggap sah atau valid. Di dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* (Korelasi Product Moment dari Karl Pearson). Pengujian dilakukan dengan uji dua sisi pada taraf signifikansi 0,05. Signifikansi diuji dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Bila nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, maka pertanyaan atau indikator tersebut dianggap valid (r hitung $>$ r tabel).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya ialah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Di studi ini dalam menguji reliabilitas tiap instrumen penulis memakai uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Perhitungan reliabilitas dengan *Cronbach Alpha* (α) ini dilaksanakan lewat

bantuan komputer IBM SPSS 23. Instrumen kuesioner dinyatakan reliabel bila nilai *Cronbach Alphanya* $> 0,70$.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilaksanakan lewat analisis statistik. Uji asumsi klasik tersusun dari:

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ialah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel mengikuti distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, analisis normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi analisis multivariat, yaitu program IBM SPSS, dan hasil analisisnya akan disabilan dalam bentuk tabel. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji one sample *Kolmogorov-Smirnov* dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas tujuannya guna menguji apa model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolonieritas dengan IBM SPSS 23 dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai *Tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Nilai *Cutoff* yang umum dipakai guna perlihatkan adanya multikolonieritas ialah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas tujuannya guna menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual beberapa pengamatan. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model yakni dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*, dengan melihat pola gambar *scatterplot*. Bila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3.6.3. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ialah statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif dipakai guna memberi gambaran umum mengenai profil sampel. Statistik ini fokus pada pengumpulan dan penyajian ringkasan data, sehingga hasilnya dapat lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Di studi ini, statistik deskriptif mencakup rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari jawaban yang diperoleh melalui kuesioner.

3.7 Model Pengujian Hipotesis

Studi ini memakai 1 variabel dependen dan 6 variabel independen. Hipotesis untuk menguji apakah akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efesiensi dan efektifitas serta kepemimpinan berdampak positif pada kinerja pemerintah daerah

dengan memakai model regresi linier berganda. Uji hipotesis dilakukan setelah memastikan sejumlah prasyarat statistik asumsi klasik telah terpenuhi. Setelah menyelesaikan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS, interpretasi informasi pada output SPSS harus dilakukan secara efektif. Keakuratan model regresi dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai dari kelayakan model tersebut, termasuk di dalamnya ialah nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Hasil uji statistik dianggap signifikan secara statistik bila nilai signifikansi berada dalam daerah kritis $< 0,05$, sementara dianggap tidak signifikan secara statistik bila nilai signifikansi ada di luar daerah kritis $> 0,05$ (Ghozali, 2016).

3.7.1 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda tujuannya guna mencari tahu dan memprediksi apa variabel independen (X) berdampak pada variabel dependen (Y) dan seberapa besar pengaruhnya ketika variabel bebas pada variabel terikat (Y) di studi ini.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄, b₅, b₆ = Koefisien regresi

X₁ = Akuntabilitas

X₂ = Transparansi

X₃ = *Responsiveness*

X4 = *Rule of law*

X5 = Efisiensi dan efektifitas

X6 = *Leadership*

e = Error

3.7.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan (uji statistik F) dipakai untuk menguji model. Menguji secara simultan melalui uji statistik F yakni untuk dapat menjelaskan pengaruh variabel independen pada variabel dependen secara simultan. Apabila nilai $H_a : \beta \neq 0$ berarti model persamaan dapat dipakai untuk memprediksi atau dengan kata lain variabel independen secara simultan memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, apabila $H_o : \beta = 0$ berarti model persamaan tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel dependen.

3.7.3 Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dipakai untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara parsial pada variabel dependen atau untuk melihat variabel apa yang memberi pengaruh dominan diantara variabel yang ada. Uji statistik t dipakai untuk menguji signifikansi pengaruh tiap variabel independen pada variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji Parsial pada analisis data studi ini memakai derajat signifikansi yakni 0,05. Uji t di studi ini akan dilakukan dengan memakai bantuan program SPSS yang disabilan pada tabel *Coefficient*. Adapun hipotesis yang diterima apabila nilai signifikan $< 5\%$. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t ialah dengan melihat nilai signifikan,

apabila nilai sig $\alpha < 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen secara parsial berdampak signifikan pada variabel dependen atau hipotesis diterima. Begitu juga sebaliknya apabila nilai sig $\alpha > 0,05$ maka dapat disimpulkan variabel independen secara parsial tidak berdampak signifikan pada variabel dependen atau hipotesis ditolak (Ghozali, 2013).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

A. Profil Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur ialah wilayah hasil pemekaran dari Kab, Kutai yang dibentuk sesuai UU No. 47 Tahun 1999, terkait pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan Mendagri pada 12 Oktober 1999. Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 Km² (17%) dari wilayah Kalimantan Timur.

Secara geografis Kab. Kutai Timur letaknya ada di 115°56'26'' – 118°58'19'' Bujur Timur dan 1°17'1'' Lintang Selatan-1°52'39 Lintang Utara. 115°5'26''-118°58'19'' Bujur Timur dan 0°02'11'' Lintang Selatan – 1°52'39'' Lintang Utara.

Kutai Timur memiliki keadaan topografi yang bervariasi, mulai dari daerah dataran seluas 536.200 ha, lereng bergelombang (1,42 juta ha), hingga pegunungan (1,6 juta ha), dan tersimpan potensi batu bara 5,35 miliar ton.

Suatu daerah dengan wilayah yang luas perlu dilihat menjadipotensi bukan menjadi hambatan banyak yang bisa dilakukan dengan wilayah yang luas itu. Kab. Kutai Timur ialah kabupaten hasil pemekaran sesuai UU No. 47 Tahun 1999, yang mencakup 5 kecamatan. Sesuai Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 133 desa. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur yakni 35.747,50 km² atau sekitar 24% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur Yang Cerdas, Merata Dan Prestasi Gemilang (CEMERLANG) Bersetandarkan nasional.

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan, sesuai metode *Balance and Scorecard* dengan Inovasi dan pembelajaran peningkatan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan perubahan serta melengkapi Sarana dan prasaranan guna meningkatkan kualiiitas pelayanan pendidikan.
- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu merata dan terjangkau dengan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada kurikulum yang bermutu, dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada anak didik yang berada di pedalaman dan perkotaan.

- c. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas sarana pendidikan, menjaga dan merhab sarana pendidikan serta membangun sarana pendidikan yang baru, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan sarana dan prasarana yang memandai agar tercapai kepuasan pelanggan (Stakeholder).

C. Program Prioritas dan Implementasi Konsep-Konsep Program

Prioritas

1. Program Prioritas

- a. Kabupaten Kutai Timur memiliki program Pendidikan yang disebut KUTIM CEMERLANG (Kutai Timur Cerdas, Merata dan Prestasi Gemilang)
- b. Program CERDAS mempunyai makna “Terciptanya Masyarakat Kutai Timur yang Cerdas, Terampil, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Tinggi.
- c. PRESTASI ialah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran.
- d. GEMILANG dalam ini memiliki arti yang lebih luas yakni Menghasilkan Prestasi yang Gemilang mampu menjawab tantangan masa depan sesuai kebutuhan Daerah Regional, Nasional, bahkan Internasional.

- e. Wajib Belajar 12 Tahun Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 8 Tahun 2010 terkait Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Implementasi Konsep-Konsep Program Prioritas

a. Pengalokasian Anggaran Pendidikan 20% Dari APBD

Kutai Timur berhasil mengalokasikan dana Pendidikan 20% dari APBD di luar gaji dan biaya kedinasan sejak tahun 2006 lalu, bahkan Kutai Timur merupakan yang pertama kali di Kalimantan Timur yang sudah berhasil memenuhi amanat UUD UU Sistem Pendidikan.

b. Program Wajib Belajar 12 Tahun

Meski secara Nasional program wajib belajar ditetapkan 9 tahun, Kutai Timur sudah menetapkan lebih dahulu menerapkan wajib belajar 12 tahun, sesuai Program Internasional (UNESCO), melalui program ini pula maka anak usia 0-18 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan formal, yang disediakan Pemerintah secara cuma-cuma.

c. Pembebasan Biaya Pendidikan

Konsekwensi logis dari penerapan wajib belajar 12 tahun, pemerintah sudah memberi jaminan akses pendidikan secara gratis mulai dari pra sekolah hingga pendidikan SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi STIPER (Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian),

selain itu pemerintah juga menanggung biaya oprasional sekolah secara menyeluruh, melalui program ini maka secara langsung atau tidak langsung akan membantu masyarakat banyak, terutama masyarakat miskin atau yang tidak mampu.

d. Pengembangan Sekolah Unggulan Terpadu

Dalam rangkaian percepatan peningkatan mutu pendidikan, Kutai Timur juga sudah membangun sekolahunggulan terpadu, yang merupakan sekolah terintegrasi mulai dari TK, SD, SMP, SMA yang berada dalam satu kawasan pendidikan dengan satu fasilitas yang memeiliki standar nasional.

e. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan

Upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan pemerintah kabupaten Kutai Timur sudah memberi insentif guru diluar dari gaji, dengan besaran minimal Rp1.100.000,- hingga Rp2.500.000,- yang diberikan sesuai wilayah kerjanya.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Objek di studi ini ialah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang berjumlah 51. Berikut jumlah populasi tiap OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Populasi OPD di Kabupaten Kutai Timur

Nama OPD (Dinas, Badan, Bagian dan Lembaga)	Populasi
Dinas Pariwisata	1
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik	1
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1
Dinas Pendidikan	1
Dinas Kebudayaan	1
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1
Dinas Kesehatan	1
Dinas Sosial	1
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	1
Dinas Perhubungan	1
Dinas Pekerjaan Umum	1
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
Dinas Kelautan dan Perikanan	1
Dinas Perkebunan	1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
Dinas Lingkungan Hidup	1
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1
Dinas Pangan	1
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
Dinas Pertanian	1
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1
Badan Penelitian dan Pengembangan	1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1
Inspektorat Wilayah	1
Sekretariat DPRD	1
Bagian Umum dan Kepegawaian	1
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah	1
Bagian Humas dan Protokol	1
Bagian Perekonomian	1
Bagian Sosial	1
Bagian Pemerintahan	1
Bagian Hukum	1
Bagian Keuangan	1
Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1
Bagian Pembangunan	1
Bagian Sumber Daya Alam	1
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1
Lembaga Departemen Agama	1
Lembaga Kejaksaan Tinggi	1
Lembaga Pengadilan Negeri Sangatta	1
DPRD Kutai Timur	1
Total	51

Sumber : Perda Kabupaten Kutai Timur

Dari data itu dapat dilihat jumlah OPD keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 51 Dinas, Badan, Bagian dan Lembaga.

Pemilihan sampel di studi ini memakai metode *purposive sampling* yakni dengan cara memilih sampel memakai kriteria yang dipakai di studi ini yakni 1 (satu) orang Pimpinan di tiap OPD dan 1 Kepala Bagian Keuangan di tiap OPD, dengan pertimbangan kepala bagian keuangan relatif mengetahui kondisi stafnya dan mengawasi langsung pekerjaan bagian pelaporan. Sesuai kriteria itu didapatkan sampel sebanyak 102 responden.

Sesuai data yang ada, maka responden di studi ini ialah sebanyak 102 orang. Maka kuesioner yang disebarkan ialah sejumlah 102 kuesioner sesuai jumlah responden. Jumlah kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 98 kuesioner, lalu yang gugur atau tidak mengisi sebanyak 4 kuesioner. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah dan dikatakan memenuhi syarat yakni sebanyak 98 kuesioner. Berikut data pengumpulan kuesioner ditunjukkan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah
Kuesioner yang disebar ke responden	102
Kuesioner yang tidak kembali	4
Kuesioner yang kembali	98
Kuesioner yang dipakai dalam penelitian	98

Sumber : Data diolah sendiri, 2023

Sesuai tabel di atas diketahui kuesioner yang peneliti sebarakan ialah sebanyak 102 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 98 kuesioner lalu yang tidak kembali sebanyak 4 kuesioner. Maka total kuesioner yang diolah ialah sebanyak 98.

4.1.3 Deskripsi Karakteristik Responden

Di studi ini, saya memakai total 98 responden sebagai sampel penelitian. Karakteristik responden berguna untuk menguraikan deskripsi identitas responden berdasar pada sampel penelitian yang sudah ditetapkan. Salah satu tujuan dengan karakteristik responden ialah memberi gambaran yang menjadi sampel di studi ini.

Karakteristik responden yang menjadi sampel di studi ini dikategorikan ke dalam beberapa karakteristik yakni dari usia responden, jenis kelamin responden, pendidikan terakhir, dan masa bekerja responden. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka akan disabilan tabel mengenai data responden seperti yang dijelaskan berikut ini:

A. Usia

Berikut ini ialah deskripsi responden pada OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur sesuai usia responden yang ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Profil Usia Responden

Usia	Frekuensi	Presentase
<20 tahun	3	3,1%
20-29 tahun	20	20,4%
30-39 tahun	47	48%
40-49 tahun	24	24,4%
> 59 tahun	4	4,1%
Total	98	100%

Sumber : Data diolah sendiri, 2023

Sesuai tabel diatas terlihat responden dengan kategori usia di bawah 20 tahun sebanyak 3 responden dengan presentase yakni 3%. Selanjutnya, responden dengan kategori usia 20-29 tahun sebanyak 20 responden dengan presentase yakni 20,4%. Pada kategori usia 30-39 tahun sebanyak 47 responden dengan presentase yakni 48%. Responden dengan kategori usia 40-49 tahun tahun sebanyak 24 responden dengan presentase yakni 24,4%. Kemudian untuk responden kategori usia lebih dari 50 tahun tahun sebanyak 4 responden dengan presentase yakni 4,1%.

B. Jenis Kelamin

Berikut ini ialah deskripsi responden pada OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur sesuai jenis kelamin yang ditunjukkan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4
Deskripsi Responden sesuai Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-Laki	56	57,1%
Perempuan	42	42,9%
Total	98	100%

Sumber : Data diolah sendiri, 2023

Sesuai tabel diatas diketahui responden di studi ini di dominasi oleh laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 56 dengan presentase yakni 57,1%, lalu untuk responden perempuan sebanyak 42 responden dengan presentase yakni 42,9%.

C. Pendidikan Terakhir

Berikut ini ialah deskripsi responden pada OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur sesuai pendidikan terakhir responden yang ditunjukkan pada tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Deskripsi Responden sesuai Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase
SMA/SMK/SLTA	3	3,2%
D-III	21	21,4%
S-1/D-IV	51	52%
S-2/SPESIALIS	14	14,3%
S-3	9	9,1%
Total	98	100%

Sumber : Data diolah sendiri, 2023

Sesuai tabel diatas diketahui dari jumlah 98 responden di studi ini mayoritas responden ialah yang berpendidikan terakhir S1 yakni sebanyak 51 responden dengan presentase yakni 52%. Responden yang paling sedikit terlihat dari tabel yang berpendidikan SMA/SMK/SLTA hanya 3 responden dengan presentase yakni 3,2%.

D. Masa Bekerja

Berikut ini ialah deskripsi responden pada OPD yang ada di Kabupaten Kutai Timur sesuai masa bekerja yang ditunjukkan pada tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.6
Deskripsi Responden sesuai Masa Bekerja

Masa Bekerja	Frekuensi	Presentase
< 1 Tahun	9	9,2%
1-2 Tahun	6	6,1%
2-3 Tahun	19	19,4%
3-4 Tahun	35	35,7%
> 5 Tahun	29	29,6%
Total	98	100%

Sumber : Data diolah sendiri, 2023

Sesuai tabel diatas terlihat responden dengan kategori masa kerja dibawah 1 tahun sebanyak 9 responden dengan presentase yakni 9,2%. Responden yang bekerja selama 1-2 tahun sebanyak 6 responden dengan presentase yakni 6,1% dan yang sudah bekerja 2-3 tahun sebanyak 19 responden dengan presentase yakni 19,4. Selanjutnya, responden dengan

kategori masa kerja 3-4 tahun sebanyak 35 responden dengan presentase yakni 35,7%. Kemudian responden dengan kategori masa kerja diatas 5 tahun sebanyak 29 responden dengan presentase yakni 29,6%.

4.1.4 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Uji Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	98	1,00	5,00	3,47	0,93
Transparansi	98	1,00	5,00	3,48	0,92
Daya Tanggap	98	1,00	5,00	3,51	0,83
<i>Rule of law</i>	98	1,00	5,00	3,53	0,86
Efisiensi dan Efektifitas	98	1,00	5,00	3,51	0,94
Kepemimpinan	98	1,00	5,00	3,63	0,92
Kinerja Pemerintah Daerah	98	1,00	5,00	3,58	0,89

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai hasil pengujian dari tabel 4.8 maka dapat dijelaskan mengenai hasil statistik deskriptif variabel-variabel dalam penelitian, yakni:

1. Akuntabilitas (X1)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,47 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang

diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,93 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

2. Transparansi (X2)

Sesuai tabel di atas ditemukan variabel transparansi (X2) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,48 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,92 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

3. Daya Tanggap (X3)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel daya tanggap (X3) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,51 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,83 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

4. *Rule of law* (X4)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel *rule of law* (X4) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,53 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,86 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

5. Efisiensi dan Efektifitas (X5)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel efisiensi dan efektivitas (X5) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,51 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,94 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

6. Kepemimpinan (X6)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel kepemimpinan (X6) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,63 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,92 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

7. Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Sesuai tabel diatas ditemukan variabel kinerja pemerintah daerah (Y) memiliki nilai minimum yakni 1, nilai maksimum yakni 5, dan mean yakni 3,58 berada di skala nilai yang memperlihatkan jawaban setuju dari pertanyaan yang diajukan. Lalu untuk standar penyimpangan memperlihatkan angka yakni 0,89 dari nilai rata-rata data yang dipakai.

4.1.5 Uji Kualitas Instrumen dan Data

A. Uji Validitas

Hal yang dilakukan sebelum memperlihatkan semua indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian ialah melakukan uji

sampel besar sebanyak 98 responden. Tingkat signifikansi 5% bila r hitung $>$ r tabel maka pernyataan itu valid. Lalu bila r hitung $<$ r tabel maka pernyataan itu tidak valid. Berikut ini ialah hasil uji validitas:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas dari Item-Item Variabel Penelitian

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,893**	0,199	Valid
	X1.2	0,849**	0,199	Valid
	X1.3	0,806**	0,199	Valid
	X1.4	0,803**	0,199	Valid
	X1.5	0,886**	0,199	Valid
	X1.6	0,883**	0,199	Valid
Transparansi	X2.1	0,882**	0,199	Valid
	X2.2	0,889**	0,199	Valid
	X2.3	0,843**	0,199	Valid
	X2.4	0,836**	0,199	Valid
	X2.5	0,850**	0,199	Valid
Daya Tanggap	X3.1	0,844**	0,199	Valid
	X3.2	0,843**	0,199	Valid
	X3.3	0,889**	0,199	Valid
	X3.4	0,804**	0,199	Valid
<i>Rule of law</i>	X4.1	0,840**	0,199	Valid
	X4.2	0,898**	0,199	Valid
	X4.3	0,839**	0,199	Valid
	X4.4	0,815**	0,199	Valid
	X4.5	0,774**	0,199	Valid

	X4.6	0,834**	0,199	Valid
Efisiensi dan Efektivitas	X5.1	0,841**	0,199	Valid
	X5.2	0,899**	0,199	Valid
	X5.3	0,896**	0,199	Valid
	X5.4	0,889**	0,199	Valid
	X5.5	0,860**	0,199	Valid
Kepemimpinan	X6.1	0,857**	0,199	Valid
	X6.2	0,909**	0,199	Valid
	X6.3	0,859**	0,199	Valid
	X6.4	0,890**	0,199	Valid
	X6.5	0,871**	0,199	Valid
Kinerja pemerintah daerah	Y1	0,840**	0,199	Valid
	Y2	0,901**	0,199	Valid
	Y3	0,838**	0,199	Valid
	Y4	0,881**	0,199	Valid
	Y5	0,853**	0,199	Valid

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai hasil uji validitas terlihat seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden ialah valid karena dilihat dari nilai r hitung > r tabel (0,199) sehingga dapat disimpulkan seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner itu dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

B. Reliabilitas

Hal yang dilakukan sesudah memperlihatkan semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian. Pernyataan dapat di

katakan reliabel bila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Berikut ini ialah hasil uji reliabel:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Item–Item Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,924	Reliabel
Transparansi	0,912	Reliabel
Daya Tanggap	0,867	Reliabel
<i>Rule of law</i>	0,912	Reliabel
Efisiensi dan Efektifitas	0,923	Reliabel
Kepemimpinan	0,925	Reliabel
Kinerja Pemerintah Daerah	0,914	Reliabel

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai tabel 4.9 hasil uji reliabilitas terlihat semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena sudah memenuhi nilai yang disyaratkan yakni dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6.

4.1.6 Analisis Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji ini ialah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan *kolmogorov smirnov*. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10
Uji Normalitas

Variabel	Sig	batas	Keterangan
Unstandar Residual	0,138	> 0,05	Normal

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai Tabel 4.10 nilai *asympt.sig* yakni $0,704 > 0,05$ maka simpulannya data berdistribusi normal.

B. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik ialah gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi ialah homoskedastisitas, yakni seluruh gangguan tadi miliki varian yang sama.

Hasil uji Heteroskedastisitas terlihat di tabel:

Tabel 4.11
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	Batas	Keterangan
Akuntabilitas	0,220	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Transparansi	0,843	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Daya Tanggap	0,732	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
<i>Rule of law</i>	0,099	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Efisiensi dan Efektifitas	0,579	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Kepemimpinan	0,129	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai tabel 4.11 terlihat nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka variabel yang diajukan tidak terjadi heterokedasitas.

C. Uji Multikolineartias

Uji multikolinieritas tujuannya guna mencari tahu apa pada model regresi ada korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Guna mencari tahu ada atau tidaknya multikolinieritas maka terlihat dari nilai VIF dan *tolerance* (α).

Tabel 4.12
Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,183	5,462	Tidak terjadi multikolinieritas
Transparansi	0,120	8,367	Tidak terjadi multikolinieritas
Daya Tanggap	0,128	7,832	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Rule of law</i>	0,088	11,340	Tidak terjadi multikolinieritas
Efesiensi dan Efektifitas	0,138	7,250	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemimpinan	0,102	9,781	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai tabel 4.12 terlihat nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

4.1.7 Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Pada model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) atau secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji t ialah sebagai berikut: Menerima H_a : bila probabilitas (p) $\leq 0,05$ artinya variabel

independent secara simultan atau parsial berdampak yang signifikan pada variabel dependent.

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang sudah dilaksanakan, yakni:

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
<i>(Constant)</i>	0,259			
Akuntabilitas	0,121	2,062	0,042	Signifikan
Transparansi	-0,088	-0,990	0,325	Tidak Signifikan
Daya Tanggap	0,300	2,531	0,013	Signifikan
<i>Rule of law</i>	0,230	2,517	0,014	Signifikan
Efisiensi dan Efektifitas	0,196	2,442	0,017	Signifikan
Kepemimpinan	0,227	2,385	0,019	Signifikan

Sumber: Output SPSS Terlampir

Sesuai tabel 4.13 diatas perhitungan regresi linear berganda memakai program SPSS versi 21.0 *for windows* didapat hasil sebagai berikut:

$$Y = 0,259 + 0,121 X_1 - 0,088 X_2 + 0,300 X_3 + 0,230 X_4 + 0,196 X_5 + 0,227 X_6$$

1. Konstanta = 0,259

Artinya bila tidak ada variabel akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas dan kepemimpinan

yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, maka kinerja pemerintah daerah yakni 0,259 satuan.

2. $b_1 = 0,121$

Artinya bila variabel akuntabilitas meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat yakni 0,121 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

3. $b_2 = -0,088$

Artinya bila variabel transparansi meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan menurun yakni 0,088 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4. $b_3 = 0,300$

Artinya bila variabel daya tanggap meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat yakni 0,300 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

5. $B_4 = 0,230$

Artinya bila variabel *rule of law* meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat yakni 0,230 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

6. $B_5 = 0,196$

Artinya bila variabel efisiensi dan efektifitas meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat yakni 0,196 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

7. $B_6 = 0,227$

Artinya bila variabel kepemimpinan meningkat yakni satu satuan maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat yakni 0,196 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

A. Pengujian hipotesis parsial (Uji t)

Uji parsial t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

1. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,042 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “akuntabilitas berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.
2. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,325 > 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “transparansi tidak berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.
3. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,013 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “daya tanggap berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.
4. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,014 \leq 0,05$. Nilai

itu dapat memperlihatkan “*rule of law* berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

5. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,017 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “efisiensi dan efektifitas berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.
6. Sesuai tabel 4.13 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,019 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “kepemimpinan berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

B. Pengujian Simultan (F)

Ketentuan uji signifikansi uji F ialah sebagai berikut: Menerima H_a : bila probabilitas $(p) \leq 0,05$ artinya variabel independent secara simultan atau parsial berdampak yang signifikan pada variabel dependent. Ringkasan hasil analisis dari uji simultan (F) & adjusted R², yakni sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Simultan (F) & Adjusted R²

Model	F hitung	Sig F	R Square	Adjusted R Square
<i>Regression</i>	151,407	0.001	0,909	0,903

Sumber: Output SPSS Terlampir

Dari hasil uji F pada tabel 4.14 diperoleh F hitung yakni 151,407 dan probabilitas yakni 0,001. Karena $\text{sig } 0,001 < 0,05$, dapat disimpulkan

variabel akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan secara bersama-sama berdampak pada kinerja pemerintah daerah.

C. Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Sesuai tabel 4.14 memperlihatkan besarnya koefisien determinasi (*Adjusted R2*) = 0,9233, artinya variabel akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan secara bersama-sama mempengaruhi variabel kinerja pemerintah daerah yakni 92.3% sisanya yakni 7.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model studi ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh akuntabilitas pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,042 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “akuntabilitas berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Sebagai instansi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki kewajiban melayani masyarakat dan memastikan program-program yang sudah dicanangkan dapat diterapkan dengan baik. Tingkat kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pemerintah daerah haruslah memiliki tingkat

akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Edowai, 2021).

Hasil ini sesuai dengan teori agensi bahwa konsep akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Maka hasil ini menjadikan akuntabilitas berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas keadministrasian negara haruslah mempertanggungjawabkan kebijakan dan serta kinerjanya pada rakyat dan BPD/DPRD sehingga terciptanya akuntabilitas yang baik akan menuntut kinerja yang baik pula dari pemerintah daerah. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja instansi yang lebih baik (Jatmiko, 2020). Sehingga, makin meningkatnya akuntabilitas akan makin menaikkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, dapat diartikan akuntabilitas berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Sejalan dengan Jatmiko (2020) yang dalam penelitiannya menyimpulkan akuntabilitas berdampak positif dan signifikan pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

4.2.2 Pengaruh transparansi pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,325 > 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “transparansi tidak berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Penilaian pada kinerja instansi pemerintahan, menuntut adanya transparansi yang baik dalam hal pelaporan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka, tujuan dari transparansi ialah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana realitas pelaksanaannya beserta dampaknya (Jatmiko, 2020). Transparansi yang baik dari pemerintah daerah diharapkan akan memberi pengetahuan pada publik sehingga publik dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Transparansi tidak berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ini dapat terjadi kemungkinan karena transparansi tidak dijalankan sesuai apa yang seharusnya, bisa jadi dengan tidak adanya keterbukaan anggaran pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat menilai transparansi pemerintah daerah masih kurang dan perlu kembali dilakukan perbaikan. Dampaknya masyarakat jadi kurang mengerti hasil dari pertanggungjawaban aparat pemerintah (Kiri & Handayani, 2021).

Hasil ini sesuai dengan teori agensi bahwa konsep transparansi di pemerintahan saat memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, maka pemerintah

harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan adanya transparansi, maka kebohongan akan sulit untuk disembunyikan,

Hasil ini tidak sejalan dengan Edowai (2021) yang dalam penelitiannya menyimpulkan transparansi berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.

4.2.3 Pengaruh daya tanggap pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,013 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “responsiveness berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, daya tanggap yang dimiliki oleh pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak. Maka, tiap pegawai dituntut untuk responsif pada keluhan atau saat melayani masyarakat (Gunawan, 2019). Tuntutan akan kinerja yang makin meningkat dari pemerintah daerah jamak terjadi pada tiap pemerintahan daerah, ini seiring dengan penerapan konsep otonomi daerah serta adanya penetapan peraturan UU terkait dengan pengelolaan pemerintahan daerah.

Daya tanggap berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Daya tanggap pegawai pemerintah daerah berhubungan dengan kemampuan dan kesediaan pegawai pemerintahan daerah untuk dengan cepat merespon serta memberi layanan pada keluhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga maka akan

dituntut pula peningkatan pada kinerja pegawai pemerintah daerah. Selain itu, dengan memberi respon (daya tanggap) yang maksimal pada masyarakat tentu akan menimbulkan kepuasan masyarakat itu (Gunawan, 2019). Dapat diartikan daya tanggap yang baik pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan daya tanggap berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Hasil ini tidak sejalan dengan Gunawan (2019) yang dalam penelitiannya menyimpulkan daya tanggap tidak berdampak pada kinerja pegawai.

4.2.4 Pengaruh *rule of law* pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,014 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “*rule of law* berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Adanya *rule of law* membuat tiap warga negara tidak akan dibayangi rasa takut akan ancaman bahaya kesewenang-wenangan dengan ditegakkannya kaidah atau norma hukum sehingga dapat memberi kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat atau organisasi (Safitri et al., 2023). Maka, pemerintah daerah yang menerapkan *rule of law* akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Rule of law* diduga menjadi salah satu faktor yang dapat berdampak pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, karena dengan adanya *rule of law* maka akan

dapat menjadi salah satu kontrol agar pemerintah daerah memberi pelayanan serta menjaga agar kinerjanya tetap baik.

Rule of law berdampak positif pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Taat pada aturan (*rule of law*) dalam pemerintahan yang baik mempunyai ciri berupa jaminan pada kepastian aturan hukum serta rasa keadilan masyarakat pada tiap kebijakan publik yang ditempuh, sehingga *rule of law* merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi (Safitri et al., 2023). Dengan pegawai yang taat pada aturan, maka secara otomatis akan berdampak pada kinerja yang diberikan akan dilakukan sebaik-baiknya sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Hasil ini sejalan dengan Safitri et al. (2023) yang dalam penelitiannya menyimpulkan *rule of law* berdampak pada kinerja pengelolaan dana desa.

4.2.5 Pengaruh efisiensi dan efektivitas pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,017 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “efisiensi dan efektifitas berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Efisiensi dan efektivitas sangat penting perannya dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sebuah kinerja yang efisien berarti hasil yang didapat memenuhi standar yang sudah ditetapkan, lalu efektif berarti pemerintah daerah mampu menghasilkan suatu kinerja yang sesuai target yang sudah ditetapkan. Oleh karena kebutuhan masyarakat yang makin

banyak, maka mengharuskan pegawai pemerintah daerah yang ada di wilayah untuk selalu meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan agar dapat melayani masyarakat dengan baik (Gunawan, 2019).

Efisiensi dan efektivitas berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Makin tinggi Efektifitas dan Efisiensi Kerja dalam instansi, akan diikuti oleh makin tingginya Kinerja Pegawai. Cara kerja yang efektif dan efisien berarti mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cara termudah, tercepat, termurah, teringan dan terpendek (Syam, 2020). Karyawan yang mampu menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan pekerjaannya, akan membuat kinerjanya makin meningkat, karena waktu pengerjaan akan makin cepat dengan tetap memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh instansi.

Hasil ini sesuai dengan teori agensi bahwa konsep pemerintah daerah akan memberikan keyakinan yang memadai untuk masyarakat dalam pencapaian yang efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Sejalan dengan Syam (2020) yang dalam penelitiannya menyimpulkan efisiensi dan efektivitas berdampak positif pada kinerja pegawai, semain baik efisiensi dan efektivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya akan makin meningkatkan pula kinerjanya.

4.2.6 Pengaruh kepemimpinan pada kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian signifikansi memperlihatkan terdapat nilai probabilitas yakni $0,019 \leq 0,05$. Nilai itu dapat memperlihatkan “kepemimpinan berdampak pada kinerja pemerintah daerah”.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan masalah yang paling penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini (Edowai, 2021). Lalu itu, kepemimpinan sangat penting perannya dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi melaksanakan tugasnya. Kinerja suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik apabila pemimpin mampu menjalankan perannya dalam mengarahkan bawahan dengan baik. Tata kelola suatu pemerintahan yang baik akan dapat terlaksana apabila penerapan kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Kepemimpinan berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Makin baik penerapan kepemimpinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka akan lebih dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintahan secara keseluruhan sehingga akan peningkatan pula kinerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Hasil ini sesuai dengan teori agensi bahwa pihak masyarakat tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari pemimpin yang dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang

diterapkan oleh pihak pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Apabila kinerja pimpinannya baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah.

Kepemimpinan yang baik akan mampu untuk mendorong para bawahannya memakai daya pikirnya dan daya kognitifnya dalam menghadapi masalah dan mencari pemecahan masalah yang dihadapinya, memberi dorongan pada bawahannya dengan mendukung dan memberi motivasi pada bawahannya, sama-sama terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalahnya, serta mendorong bawahannya memakai inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat berkembang dan berprestasi (Safitri et al., 2023). Maka dapat disimpulkan kepemimpinan berdampak positif pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupten Kutai Timur.

Hasil ini sejalan dengan Safitri et al. (2023) yang dalam penelitiannya menyimpulkan kepemimpinan berdampak pada kinerja pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Studi ini tujuannya guna menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, *rule of law*, efisiensi dan efektivitas serta kepemimpinan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Metode pengambilan sampel di studi ini memakai jenis *non-probability* sampling dengan teknik *purposive sampling*. Sampel di studi ini sebanyak 98 sampel yang terdiri dari Ketua Pimpinan di tiap OPD dan Kepala Bagian Keuangan di tiap OPD, dengan pertimbangan kepala bagian keuangan relatif mengetahui kondisi stafnya dan mengawasi langsung pekerjaan bagian pelaporan.

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Akuntabilitas berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas-tugas keadministrasian negara haruslah mempertanggungjawabkan kebijakan dan serta kinerjanya pada rakyat dan BPD/DPRD sehingga terciptanya akuntabilitas yang baik akan menuntut kinerja yang baik pula dari pemerintah daerah.
2. Transparansi tidak berdampak secara signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Ini dapat terjadi kemungkinan karena transparansi tidak dijalankan sesuai apa yang seharusnya, bisa jadi dengan tidak adanya keterbukaan anggaran pada masyarakat, sehingga membuat masyarakat menilai transparansi pemerintah daerah masih kurang dan perlu kembali dilakukan perbaikan.

3. Daya tanggap berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Daya tanggap pegawai pemerintah daerah berhubungan dengan kemampuan dan kesediaan pegawai pemerintahan daerah untuk dengan cepat merespon serta memberi layanan pada keluhan atau permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga maka akan dituntut pula peningkatan pada kinerja pegawai pemerintah daerah.
4. *Rule of law* berdampak positif dan signifikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Taat pada aturan (*rule of law*) dalam pemerintahan yang baik mempunyai ciri berupa jaminan pada kepastian aturan hukum serta rasa keadilan masyarakat pada tiap kebijakan publik yang ditempuh.
5. Efisiensi dan efektivitas berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Makin tinggi Efektifitas dan Efisiensi Kerja dalam instansi, akan diikuti oleh makin tingginya Kinerja Pegawai.
6. Kepemimpinan berdampak positif dan signifikan pada kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Makin baik penerapan kepemimpinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka akan lebih dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintahan secara keseluruhan sehingga akan peningkatan pula kinerja pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Di studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Berikut ini keterbatasan di studi ini:

1. Kuesioner yang dibagikan tidak dalam pantauan peneliti, sehingga peneliti tidak tahu apakah ada responden betul-betul mengisi kuesioner dengan cermat atau tidak.
2. Data yang diperoleh hanya melalui instrumen tertulis tidak melakukan wawancara secara langsung pada seluruh responden dan mengacu pada pengukuran diri sendiri (*self rating*) untuk menilai OPD tempat responden bekerja.
3. Pendekatan studi ini hanya memandang konsep kinerja organisasi publik melalui pendekatan dari perspektif birokrasi itu sendiri.

5.3. Saran

Di studi ini terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yakni:

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel baru yang dapat memengaruhi kemampuan kinerja pemerintah daerah.
2. Peneliti selanjutnya disarankan agar bisa mengembangkan studi ini dengan memakai teori baru.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkolaborasikan metode kualitatif dan kuantitatif agar hasil yang didapatkan lebih akurat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah indikator atau alat ukur pada tiap variabel yang dipilih agar mendapatkan pembaharuan sesuai perkembangan masa.

5. Unyuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur menerapkan *rule of law* yang baik serta kepemimpinan yang dapat diandalkan harus selalu dimiliki agar kinerja instansi pemerintahan makin baik ke depannya.

7

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (1st ed.). Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Aini, D. N. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Keputusan Pendanaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan)*, 1(1), 34-45.
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan*. <http://ovy19.wordpress.com>.
- Ardianty, F. Y., Utami, W. B., & Pardanawati, S. L. (2022). Analisa pengaruh pemahaman prinsip good corporate governance, pengendalian intern, dan komitmen organisasi pada kinerja pemerintah Desa Kateguhan, Sawit, Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–12.
- Ari setyaningrum, J. (2015). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Auditya, L. (2013b). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42.
- Azmal, E. (2018). Analisis Pengaruh Faktor–Faktor *Good Governance* Pada Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Langkat. *Journal Equilibrium Repositari Usu*, 1(1), 89–105.
- Caiden, G. E. (1988). Toward a general theory of official corruption. *Asian Journal of Public Administration*, 10(1), 3–26.
- Coryanata, I. (2007). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan terkait Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Simposium Nasional Akuntansi X*, 3(1), 31–49.
- Daulay, M. (2010). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: USU Press.
- Dumbi, R., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh penerapan *Good Governance* pada kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 92–102.

- Edowai, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. (*Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA*), 79.
- Eisenhardt, K. (1989). *Agency Theory: An Assesment and Review*. Academy of Management Review.
- Erlina. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: USU Press.
- Faiz, M. A. S., & Andayani, A. (2022). Pengaruh Independensi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan pemahaman *Good Governance* pada kinerja auditor pemerintah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 656–661.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS)* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, I. (2019). Pengaruh Daya Tanggap Dan Kinerja Pegawai Pada Kepuasan Masyarakat Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Simplex*, 2(1) 268-283.
- Halim, A., Bambang, S., & Kusufi, M. (2013). *Akuntansi Manajemen* (2nd ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi* (1st ed.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayah, N., & Suprojo, A. (2018). Pengaruh kepemimpinan situasional pada peningkatan kinerja pegawai dan terciptanya *Good Governance*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(3), 106–111.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metode Penelitian Busnis Untuk Akuntansi & Manajemen* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Ismiarti. (2013). Analisis Inplementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi pada Kinerja Pemerintah. *Thesis Universitas Bengkulu*. 65.

- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh pengawasan internal, akuntabilitas dan transparansi pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman (Survei pada seluruh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246.
- Jitmau, F., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Pada Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 276–285. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.16036>
- Khaerul, A. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Disiplin Kerja Dan Pelatihan Kerja Pada Kinerja Karyawan Bmt Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. *Skripsi*, 81.
- Kiri, S. H. P., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Publik Serta Fungsi Pemeriksaan Inten Pada Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–17.
- Krina, P., & Lalolo, L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Lubis, A. F. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. Medan: USU Press.
- Mahsun, M. (2011). *Indikator-indikator Kinerja*. Mohamad Mahsun.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (4th ed.). Andi Offset, Yogyakarta.
- Mascarenhas, R. C. (1996). *Searching for Efficiency in the Public sector: Interim Evaluation of Performance Budgeting in New Zealand*. 16(3), 13–27.
- Nasrun, M. (2019). Pengaruh *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Equilibrium Universitas Muhammadiyah Makassar*. *Journal Equilibrium Universitas Muhammadiyah Makassar*, 8(1), 19–26.
- Ningsih, F. (2013). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Kemampuan Sumberdaya Manusia pada Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(3), 37-52
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

- Nurbaeti, T., & Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh good goernance dan sistem pengendalian intern pemerintah pada kinerja aparatur pemerintah daerah dan implikasinya pada pelayanan publik (studi kasus di pemerintah Kabupaten Garut). *10th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2(2), 1299–1311.
- Nurhazizal, Basri, Y. M., & Nasir, A. (2019). Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kompetensi SDM pada kinerja pemerintah desa: *Good Governance* sebagai pemediasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 80–92.
- Pratiwi, D. (2014). Hubungan Good Corporate Governance Pada Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Gunadarma*, 3(1), 100-117.
- Putra, D. D., Rantelangi, C., & Diyanti, F. (2022). Pengaruh transparansi , akuntabilitas dan pengendalian intern pada kinerja instansi pemerintah pada dinas perdagangan Kota Samarinda. *Jiam*, 7(1), 34–44.
- Rahayu, D. I. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Good Government Governance pada Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kab. Gresik. *Gema Jurnal Ekonomi*, 5(1), 23–32.
- Rahmanurrasjid, A. (2008). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah. *Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Rahmatullah. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Pada Kinerja Karyawan Pada Pt. Btpn Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Riswanto, N. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Universitas Jember*, 4(2), 37-51.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2006). *Perilaku Organisasi* (Bahasa Ind). Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Rosyada, A. A. (2016). Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Rangka Pelayanan Publik di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 102–114.
- Safitri, A. E., Pramono, J., & Istiyani, A. (2023). Pengaruh Good Government Governance Dan Perilaku Kepemimpinan Kepala Desa Pada Kinerja Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. *Jurnal Imagine*, 3(1), 1–11.

- Sandu, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sari, Y. P., Rizan, M., & Purwohedi, U. (2020). Analisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), budaya perusahaan & kepemimpinan pada kinerja perusahaan berbasis balanced scorecard: studi pada perusahaan asuransi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Keuangan*, 1(1), 57–74.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sopannah. (2005). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik pada Hubungan antara Pengetahuan Anggaran Daerah dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Logos*, 3(1), 349-370.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, A. (2010). *Auditing* (2nd ed.). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumantri, M. S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Sumenge, A. (2013). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 147-162.
- Suprpto, T. (2006). *Pengantar Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sutarsa, M. (2023). Pengaruh *Good Governance* dan komitmen organisasi pada kinerja dinas pemerintah (sensus pada dinas Kota Tasikmalaya). *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 201–210.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, 4(2), 128–152.
- Terry, G., & W. Rue, L. (2010). *Dasar-dasar Manajemen* (11th ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Umar, H. (2000). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

- Wahyu, P. A. S., Putra, I. M. W., & Giri, N. P. R. (2022). Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, pemahaman *Good Governance*, profesionalisme, dan independensi pada kinerja auditor pada kantor BPK RI Provinsi Bali. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 3(1), 45–50.
- Wattimena, M. A. (2020). Implementasi good corporate governance, *Good Governance* dan kepemimpinan situasional pada kinerja pegawai. *Public Policy*, 1(2), 195–214.
- Werimon, S., Ghozali, I., & Nazir, M. (2007). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Pada Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Terkait Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Study Empiris Di Provinsi Papua). In *Simposium Nasional Akuntansi*. 2(4), 113-134,
- Zimmerman, J. . (1977). The Municipal Accounting maze: an analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 1(1), 107–144.

L

A

M

P

I

R

A

N

KUESIONER PENELITIAN

Bagian I Data Responden

Inisial Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia :

Pendidikan Terakhir : S1 S2 S3

Lama Bekerja : 1 Tahun 1-5 Tahun 5-10 Tahun >10 Tahun

Bagian II Item Pertanyaan

Petunjuk:

Beri tanda (√) pernyataan dibawah ini pada kolom yang dianggap paling mewakili diantara alternatif jawaban yang ada dibawah ini, yakni:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Akuntabilitas

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kutai Timur melibatkan unsur-unsur masyarakat					

2	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah melaksanakan akuntabilitas mengelola keuangan dengan baik					
3.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah melakukan penyajian informasi, rencana strategis, dan kebijakan umum anggaran penyelenggaraan pemerinah					
4.	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kutai Timur disusun secara jujur, terhindar dari penyalahgunaan jabatan dan sesuai hukum					
5.	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kutai Timur disabilan secara terbuka, cepat dan tepat pada seluruh masyarakat					
6.	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kutai Timur dipertanggungjawabkan pada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan pada masyarakat luas (horizontal)					

Transparansi

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah memberi informasi pada publik terkait kebijakan anggaran					
2.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah memiliki dokumen anggaran yang mudah diakses ke publik					
3.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah memberi laporan pertanggung jawaban dengan tepat waktu					
4.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah mengakomodasi suara atau usulan publik					
5.	Pemerintah daerah Kutai Timur memakai sistem pemberian informasi pada publik					

Daya Tanggap

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Prosedur layanan pengaduan di pemerintah daerah Kutai Timur sudah memadai					
2.	Ada tindak lanjut laporan pengaduan di pemerintah daerah Kutai Timur					
3.	Pemerintah daerah Kutai Timur memiliki sikap dan cepat tanggap dalam membantu pegawai yang mengalami kesulitan					
4.	Pemerintah daerah Kutai Timur yang memberi koreksi dan saran pada pegawai yang lalai saat bekerja					

Rule of law

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah menegakkan hukum dan kejelasan aturan hukum					
2.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah menyiapkan lembaga peradilan khusus untuk menegakkan keadilan					
3.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik sesuai hukum					
4.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah mengimplementasikan rancangan <i>regulatory practice principle</i> (prinsip praktik pengaturan) yang memadai					
5.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah mengimplementasi analisis kebijakan yang holistik dan sistemik					

6.	Pemerintah daerah Kutai Timur memberi sikap penghargaan pada HAM dan nilai kemasyarakatan					
----	---	--	--	--	--	--

Efisiensi dan Efektifitas

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah memanfaatkan teknologi yang efisiensi dan efektifitas bagi seluruh pegawai yang bekerja di pemerintahan.					
2.	Pemerintah daerah mengimplementasi pemantapan yang efisien pada struktur organisasi di Kutai Timur					
3.	Pemerintah daerah Kutai Timur menyediakan kajian sumber daya manusia, sumber daya fisik dan dana keuangan yang memadai					
4.	Pemerintah daerah Kutai Timur memberi tindakan yang efisiensi dan efektifitas untuk mengoptimisasi penggunaan sumber daya					
5.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah memberi kejelasan sikap dukungan pada tujuan yang berguna dan efektif serta berdaya guna yang berkelanjutan					

Kepemimpinan

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Pimpinan pemerintah daerah Kutai Timur dalam memberi tindakan memakai pendekatan yang tidak menganut unsur paksaan dan hukuman					

2.	Pimpinan pemerintah daerah Kutai Timur senang menerima saran, pendapat, dan kritikan-kritikan dari bawahan					
3.	Pimpinan pemerintah daerah Kutai Timur lebih mengutamakan kerjasama dalam usaha mencapai tujuan					
4.	Pemimpin pemerintah daerah Kutai Timur membimbing pegawai dalam menyelesaikan tugas					
5.	Pimpinan pemerintah daerah Kutai Timur memberi pelatihan peningkatan kualitas mutu pada pegawai					

Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	Tanggapan				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kutai Timur selama ini dapat dicapai dengan baik.					
2.	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah mengimplementasikan prinsip ekonomis, efisien dan efektif pada capaian tujuan					
	Pemerintah daerah Kutai Timur sudah menetapkan indikator kinerja untuk tiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan					
3.	Kegiatan atau program yang disusun oleh pemerintah daerah Kutai Timur sudah mengakomodir tiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat					
4.	Pemerintah daerah Kutai Timur melaksanakan kegiatan yang sudah dikontrol dengan ukuran kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program					
5.	Konsentrasi cakupan pelayanan pada objek dan wilayah di daerah Kutai Timur					

LAMPIRAN. UJI DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	98	1,00	5,00	3,4694	,93130
Transparansi	98	1,00	5,00	3,4857	,92078
Daya Tanggap	98	1,00	5,00	3,5128	,82983
<i>Rule of law</i>	98	1,00	5,00	3,5306	,86432
Efisiensi dan Efektifitas	98	1,00	5,00	3,5143	,94596
Kepemimpinan	98	1,00	5,00	3,6265	,92464
Kinerja Pemerintah Daerah	98	1,00	5,00	3,5816	,88984
Valid N (listwise)	98				

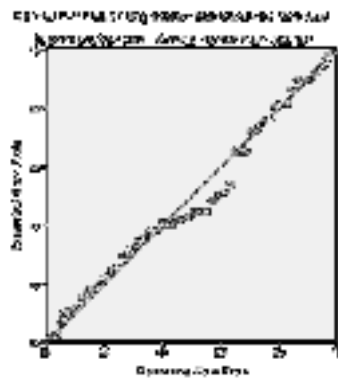
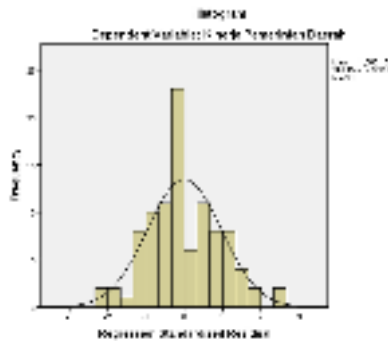
LAMPIRAN. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,34253811
	Absolute	,117
Most Extreme Differences	Positive	,117
	Negative	-,046
Kolmogorov-Smirnov Z		1,156
Asymp. Sig. (2-tailed)		,138

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



LAMPIRAN. UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

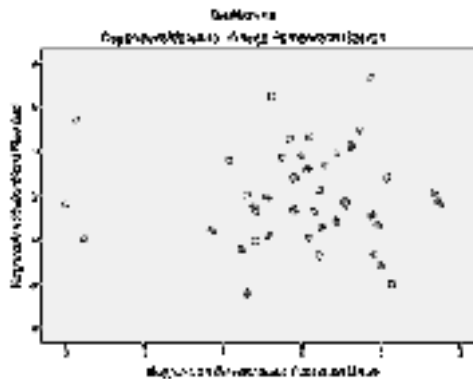
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,259	,622		,416	,678		
1 Akuntabilitas	,121	,059	,152	2,062	,042	,183	5,462
Transparansi	-,088	,088	-,091	-,990	,325	,120	8,367
Responsiveness	,300	,119	,224	2,531	,013	,128	7,832
<i>Rule of law</i>	,230	,091	,268	2,517	,014	,088	11,340
Efisiensi dan Efektifitas	,196	,080	,208	2,442	,017	,138	7,250
Leadership	,227	,095	,236	2,385	,019	,102	9,781

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

LAMPIRAN. UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,315	,369		3,566	,001
	Akuntabilitas	-,043	,035	-,294	-1,236	,220
	Transparansi	,010	,052	,058	,198	,843
	Responsiveness	,024	,070	,098	,343	,732
	<i>Rule of law</i>	-,090	,054	-,572	-1,669	,099
	Efisiensi dan Efektifitas	,026	,047	,152	,557	,579
	Leadership	,087	,056	,488	1,534	,129

a. Dependent Variable: ABS_RES



LAMPIRAN. UJI REGRESI LINEAR BERGANDA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,953 ^a	,909	,903	1,386

a. Predictors: (Constant), Leadership, Efisiensi dan Efektifitas, Akuntabilitas, Responsiveness, Transparansi, *Rule of law*

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1745,340	6	290,890	151,407	,000 ^b
	Residual	174,834	91	1,921		
	Total	1920,173	97			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Leadership, Efisiensi dan Efektifitas, Akuntabilitas, Responsiveness, Transparansi, *Rule of law*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,259	,622		,416	,678
	Akuntabilitas	,121	,059	,152	2,062	,042
	Transparansi	-,088	,088	-,091	-,990	,325
	Responsiveness	,300	,119	,224	2,531	,013
	<i>Rule of law</i>	,230	,091	,268	2,517	,014
	Efisiensi dan Efektifitas	,196	,080	,208	2,442	,017
	Leadership	,227	,095	,236	2,385	,019

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah